

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DALAM  
PENINGKATAN INVESTASI ASING DI SEKTOR KAWASAN INDUSTRI  
BANTAENG (KIBA)**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik  
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh :**

**ILHAM**

**NIM: 30600113040**

**FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ilham  
Nim : 30600113040  
Tempat & Tgl. Lahir : Bantaeng, 30 Maret 1995  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ushuluddin Filsafat dan Politik  
Alamat : Perumahan Saumata Indah, Blok B-1  
Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng Dalam  
Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kawasan Industri  
Bantaeng (KIBA).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Samata, 14 Februari 2019

Penyusun



Ilham

Nim: 30600113040

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulis skripsi saudara **ILHAM**, NIM: 30600113040, Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul "Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng Dalam Peningkatan Investasi Asing Di Sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)". Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk melaksanakan **Ujian Tutup (Munaqasah)**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses selanjutnya.

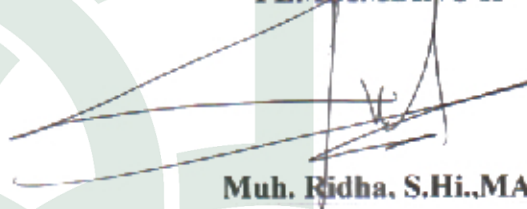
Samata, Februari, 2019

**PEMBIMBING I**



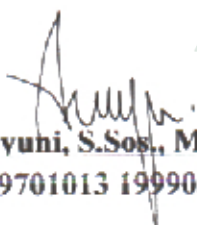
**Ismah Tita Ruslin, S.Id, M.Si**  
NIP.19780428 200912 2002

**PEMBIMBING II**



**Muh. Ridha, S.Hi.,MA**

**PENGUJI I**



**Wahyuni, S.Sos., M.Si**  
NIP.19701013 199903 2 001

**PENGUJI II**



**Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si**  
NIP.1975096 200501 2 005

**KETUA JURUSAN**



**Syahrir Karim, M.Si.,Ph.D**  
NIP.19780410 200901 1 013

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng Dalam Peningkatan Investasi Asing Di Sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)”, yang disusun oleh Ilham, NIM: 30600113040, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2019 M, bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 15 Februari 2019 M.

10 Jumadil Akhir 1440 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Abdullah, M.Ag	(  )
Sekretaris	:	Ismah Tita Ruslin, S.Ip., M.Si	(  )
Munaqisy I	:	Wahyuni, S.Sos., M.Si	(  )
Munaqisy II	:	Dr. Anggriani Alamsyah, S.Ip., M.Si	(  )
Pembimbing I	:	Ismah Tita Ruslin, S.Ip., M.Si	(  )
Pembimbing II	:	Muh. Ridha, S.Hi., MA	(  )

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik

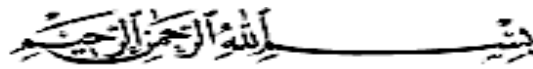
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.

NIP. 19590704 1989031 1 003

## KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya serta atas Izin-Nya juga sehingga penulisan Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah kabupaten Bantaeng Dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)” dapat terselesaikan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Saw, yang telah membawa peradaban dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, Sekaligus sebagai suri tauladan bagi ummat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini begitu banyak hambatan dan keterbatasan, sehingga banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penuh penghargaan tak terhingga kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Penulis mencoba membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian, di dalam penulisan masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan demi pengembangan ilmu di masa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya penulis menyampaikan banyak Terimakasih yang tak terhingga, terkhusus kepada ayahanda Ahmad dan ibunda Hanuri yang selama ini telah

banyak memberikan kasih sayang yang tulus, memberikan motivasi, dorongan dan dukungan serta do'anya sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini. Dan juga tidak lupa kepada adikku tercinta Nurhikma dan Kakakku tercinta Herman, SE, yang selalu memberikan arahan, motivasi serta nasehat dalam menyelesaikan skripsi penulis, dan juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh Natsir, MA. Selaku Dekan fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Tasmin, M.Ag. Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.
4. Bapak Dr. H. Mahmuddin, M.Ag. Sebagai wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.
5. Bapak Dr. Abdullah, M.Ag. Sebagai wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.
6. Bapak Syahrir Karim, M.Si, Ph.D selaku ketua jurusan Ilmu Politik dan Bapak Febrianto Syam, S.Ip., M.Ip selaku sekretaris jurusan Ilmu Politik, terima kasih penulis ucapkan atas motivasi serta masukannya dan ilmu yang telah diberikan kepada saya selama masuk di UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Ismah Tita Ruslin, S.IP, M. Si. Selaku pembimbing I, dan Bapak Muh. Ridha, S.Hi.,MA. Selaku pembimbing II terima kasih selalu memberikan saran serta memberikan motivasi dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.




8. Ibu Wahyuni, S.Sos., M.Si. Selaku ketua jurusan Sosiologi Agama dan sekaligus penguji I, dan Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.Ip., M.Si. Selaku penguji II, terima kasih penulis ucapkan atas kesungguhan dan ketulusan dalam pengujian sehingga skripsi penulis dapat teruji kelayakannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang telah memberikan arahan, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ushuluddin Filsafat & Politik terutama dosen Ilmu Politik terima kasih atas bimbingan yang memberikan bekal pendidikan dan staf atau pengelola studi Ilmu Politik terima kasih atas bantuannya.
10. Ucapan terima kasih kepada para informan yang dengan kerelaannya memberikan informasi kepada penulis selama penulisan skripsi.
11. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa(i) angkatan 2013 Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat & Politik (FUIP). khususnya kelompok 3-4 yang satu perjuangan dalam menempuh Ilmu dan meraih gelar sarjana, penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan dan penulis do'akan supaya kita semua menjadi insan pencipta, pengabdian dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita dapatkan di ruang perkuliahan.
12. Untuk senior-senior Ilmu Politik terima kasih telah mendidik dan membina penulis secara suka rela baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis memiliki sedikit karakter dan jiwa kemanusiaan.

13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unuversitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 55 di desa Ulujangang, Kec. Bontolempangang, Kab. Gowa, penulis ucapkan terima kasih karena sudah bersama-sama dalam memenuhi salah satu dari 3 tri darma perguruan tinggi, yaitu "Pengabdian".

Penulis menyadari sepenuhnya, karya kecil ini merupakan sebuah karya sederhana yang sarat dengan kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Samata, 15 Februari 2019

Penyusun



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Ilham

Nim: 30600113040

ALAUDDIN  
MAKASSAR



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Landasan Teori.....	21
B. Kerangka Konseptual .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33

B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis Data .....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Investasi Asing di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) .....	47
C. Dampak Keberadaan Kawasan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa’jukukang.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Implikasi Penelitian.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

**Nama : Ilham**  
**Nim : 30600113040**  
**Jurusan : Ilmu Politik**  
**Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng Dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).**

---

Penelitian ini mengkaji tentang “Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng Dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)”. Investasi merupakan *variable* terpenting untuk meningkatkan kinerja perekonomian, bahkan akan memberikan stimulan terhadap peningkatan perkapita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iklim investasi yang baik adalah iklim yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dihadapkan pada persoalan menghadapi tantangan mendasar serta membangun hal-hal yang menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan kawasan industri.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana dalam metode tersebut merupakan penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah (1) Teori Peran, (2) Otonomi Daerah, (3) Investasi Asing (*Foreign direct Investment*), (4) *Developmentalisme*. Sedangkan proses analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam peningkatan investasi asing di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), dilakukan melalui cara, yaitu: 1) Kebijakan; 2) Kemudahan dalam perizinan; 3) Pembangunan infrastruktur yang baik; 4) Pengembangan sumber daya manusia. Dengan hadirnya Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) membawa suatu perubahan dalam masyarakat baik positif maupun negatif khususnya di Kecamatan Pa’jukukang secara ekonomi membawa banyak dampak positif. Namun secara sosial membawa perubahan negatif berkenaan dengan tercemarnya lingkungan dari hasil kegiatan industri sehingga mengakibatkan para petani mengalami kerugian karena mengakibatkan hasil dari pertanian itu menurun dan bahkan mengakibatkan tanaman tidak tumbuh dan mati, begitupun yang dirasakan oleh petani rumput laut yang mengakibatkan rumput laut tidak jadi atau rusak di akibatkan oleh kegiatan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Setelah pemerintahan orde baru ditumbangkan pada bulan Mei 1998, bangsa Indonesia menunjukkan kesepakatan untuk kembali ke demokrasi. Niat dan tekad untuk menggunakan demokrasi itu terlihat pada banyaknya perubahan yang mendasar di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Para pejuang reformasi yakin bahwa sistem pemerintahan modern yang demokratis dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Meski tidak ada satupun kesepakatan tertulis yang dibuat, namun kesepakatan itu telah dicapai karena tidak ada satupun kelompok atau organisasi sosial politik pada bulan Mei 1998 yang tidak menginginkan (menolak) demokrasi melalui demokratisasi dan reformasi.<sup>1</sup>

Demokrasi dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dari berbagai krisis yang dialami Indonesia yang merupakan warisan orde baru. Rekonstruksi besar-besaran pun terjadi dalam tatanam pemerintahan Indonesia salah satunya yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai

---

<sup>1</sup>Ibnu Hajar. S.Sos. M. I. KOM, *Teori Dan Praktek Kemunikasi Politik*, (Yogyakarta: Genta Press 2015), h. 2.

dengan peraturan perundang-undangan, hal ini di perkuat oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat. Dengan adanya pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menunjang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Pemerintah di tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk pemerintah daerah dan juga akan terciptanya respon yang baik dari rakyat.<sup>3</sup> Tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan berbagai aktivitasnya, demi mencapai keinginan bersama. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan di era sekarang ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi yang masuk ke daerah.

Kegagalan pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh terlalu banyaknya perhatian diberikan pada politik di masa lalu, kini dianggap sebagai faktor utama penyebab ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, pembangunan dalam masa demokrasi pancasila ini dititikberatkan pada bidang ekonomi, sementara pada pembangunan politik lebih ditujukan untuk menciptakan situasi

---

<sup>2</sup>Ibnu Hajar. S.Sos. M. I. KOM, *Teori Dan Praktek Komunikasi Politik*, , h. 2-3.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar. S.Sos. I.M, I.KOM, *Teori Dan Praktek Komunikasi Politik*, , h. 3

yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi.<sup>4</sup> Sesuai amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 memberikan amanat dan tuntunan yang jelas kepada kita untuk memanfaatkan seluruh kekayaan alam Indonesia bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS. Al-Luqman/31: 20

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ ٢٠

Terjemahannya:

*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.<sup>5</sup>*

Ayat diatas menyatakan: *Tidakkah engkau, wahai Nabi Muhammad atau siapa saja, memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan kamu apa yang ada di langit, seperti udara, matahari, bulan, bintang-bintang, angin, dan sebagainya, dan menunjukkan juga untuk kemaslahatan kamu apa yang di bumi, seperti gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, laut, dan sungai serta segala isinya. Dan, di samping itu, Dia menyempurnakan serta menganugerahkan secara luas bagi kamu nikmat-Nya yang lahir, seperti kesehatan dan kelengkapan anggota tubuh, harta benda, kedudukan dan keturunan, dan juga nikmat-Nya yang batin, seperti ketenangan batin dan kedamaian, optimis, akal,*

---

<sup>4</sup> Carlton Clymer Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 486.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2007), h. 413.



emosi, dan lain-lain. Dia menundukkan dan menganugerahkan kepada kamu semua itu berkuasa juga mencabut semua atau sebagian dari nikmat-nikmat itu. Karena itu, janganlah angkuh, jangan juga berbangga melampaui batas, apalagi mempersekutukan Allah dan menyembah selain-Nya.<sup>6</sup>

Adapun hadits yang berkaitan dengan ayat diatas adalah :

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya :

*Diberitakan kepada kami Mua'lla ibn Asad, diberitakan kepada kami Wuhaib, dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibn al-Awwam r.a, dari Nabi Saw. bersabda: “Sungguh alangkah baik jika salah seorang diantara kalian (umatku) yang mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan menjualnya dengan membuka wajah (tanpa rasa malu} karena Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain baik diberi maupun tidak. (HR. Al-Bukhari).<sup>7</sup>*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi untuk dikuasai dan di manfaatkan apa yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi lahir dan batin sesuai dengan kebutuhan dan saling membantu sesama umat, agar tidak ada lagi yang meminta minta. Hal ini mempertegas bahwa kemalasan merupakan pangkal dari kemiskinan. Apalagi

<sup>6</sup>M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 318-319

<sup>7</sup>Muhammad Ibn Ismail Abu ‘, *Abdullah Al-Bukhari Al-Ju’fi, Aljami’ Al-musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Mij Umar Rasulullah Wa Sunnanih Wa Ayyamih* Juz 111 (Cet: Idar Tauq Al-Najah 1422 H), h. 113.

banyak hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw, sendiri sering berdo'a agar terlindung dari sifat malas dan kemiskinan.

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan global di dorong oleh adanya perkembangan pesat di bidang iptek, terutama teknologi komunikasi, informasi dan transportasi yang telah mengubah secara drastis pola produksi, perdagangan dan transaksi moneter. Keadaan tersebut membuka peluang bagi kemajuan bersama setiap negara untuk akses yang lebih terbuka kepasar global, tingginya kegiatan pasar modal dan lintas batas tenaga professional mendorong persaingan dalam ekonomi global. Dinamika globalisasi telah membuka peluang munculnya aktor-aktor baru di luar pemerintah seperti kalangan dunia usaha, professional, media massa, NGO, serta masyarakat madani yang berperan di forum global.<sup>8</sup>

Upaya pemerintah meningkatkan investasi *riil* di dalam negeri, mencapai klimaksnya pada saat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (PM), menetapkan kebijakan penanaman modal untuk (a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam kebijakan ini pemerintah memperlakukan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Effendi Sirajuddin, *Memerangi Sindrom Negara Gagal*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2009), h. 14.

ketentuan perundang-undangan, serta membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan bagi perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.<sup>9</sup> Dengan adanya investasi dalam negeri atau Asing maka akan berpengaruh terhadap APBN, karena APBN menggambarkan sumber pendapat dan alokasi belanja negara, maka pinjaman dari modal asing akan berfungsi menambah sumber pembiayaan negara untuk dijadikan sektor-sektor perekonomian negara agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, sehingga memberi kontribusi kepada negara maupun masyarakat melalui hasil-hasil pembangunan di berbagai sektor di daerah di Indonesia. Maka, dari itu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah/khalifah Allah, wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengambil suatu kebijakan yang memang di inginkan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dimana keuntungan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi tetapi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Najm/53:31

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ٣١

Terjemahannya:

*Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (dengan demikian) dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup>Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 115-116.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 527.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang berada dalam petunjuk. Keberadaan orang-orang sesat dan membangkang perintah Allah boleh jadi menimbulkan kesan bahwa mereka berada diluar kuasa Allah. Untuk kesan itu, ayat di atas menyatakan bahwa: Segala sifat kesempurnaan disandang oleh Allah Swt. Semata dan *milik Allah saja apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi*. Dia sendiri yang mencipta serta berhak mengaturnya semua berada di dalam genggamannya kekuasaan-Nya sehingga, kalau Dia menghendaki, niscaya semua akan beriman dan memeluk agama-Nya, tetapi itu tidak Dia kehendaki karena Dia telah memberi manusia kebebasan memilih dan *supaya Dia memberi balasan*, yakni hukuman setimpal, *kepada orang-orang yang berbuat jahat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan berupa anugerah-Nya kepada orang-orang yang berbuat baik dengan ganjaran yang lebih baik*, yakni surga yang tidak terlukiskan dengan kata-kata keindahan dan kenikmatannya.<sup>11</sup>

Menarik kesimpulan bahwa alam semesta ini adalah milik Allah Swt, dan manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah Swt, untuk menggunakan miliknya, agar bisa dimanfaatkan dengan wajib saling menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan kebutuhan sesama dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah.

Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia

---

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 195-196

juga mengharapkan manfaat lainnya, seperti alih teknologi (*transfer of technology*) dan penciptaan lapangan kerja. Kegiatan penanaman modal asing tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini mengingat, bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin dicukupi oleh pemerintah dan perusahaan swasta nasional. Keadaan inilah yang mendorong pemerintah untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik investasi asing masuk ke Indonesia.<sup>12</sup>

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen tidaklah mungkin dapat dicapai hanya dengan mengandalkan investasi yang domestik yang saat ini masih minimal. Itu sebabnya, bangsa ini memerlukan investasi asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) dalam jumlah signifikan untuk membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi.<sup>13</sup> Terutama dalam industri dengan tujuan untuk menambah tabungan atau modal bangsa kita agar dapat membangun industri dalam negeri sehingga memberikan lapangan pekerjaan untuk lapisan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian untuk membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia serta berlaku adil kepada masyarakat bawah, karena keadilan merupakan perintah Allah kepada khalifah di muka bumi ini, karena keadilan di dalam Al-Qur'an sangat penting dalam ajaran islam, terutama dalam kehidupan ekonomi.

---

<sup>12</sup>M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 604.

<sup>13</sup> Effendi Siradjuddin, *Memerangi Sindrom Negara Gagal*, h.295.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman /55:9

وَأَقِيمُوا آلُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Terjemahannya:

*Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. .<sup>14</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Dia meletakkan secara mantap neraca keadilan dan keseimbangan *supaya kamu jangan melampaui batas dalam neraca keadilan dan keseimbangan*, baik dalam menyangkut hal yang ditimbang maupun yang diukur, *dan karena itu pula tegakkanlah secara sempurna timbangan*, yakni neraca keadilan, *itu dalam segala persoalan terhadap semua pihak walau terhadap diri kamu sendiri. Tegakkanlah dengan adil sehingga menguntungkan semua pihak dan janganlah kamu mengurangi neraca itu dengan bentuk pengurangan apa pun agar tidak berkurang pula neraca timbangan amal-amal kamu serta ganjarannya di akhirat nanti.*<sup>15</sup>

Menarik kesimpulan bahwa nilai keadilan sangat penting dalam hidup ini terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik, dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus di terapkan dalam kehidupan politik dan ekonomi seperti proses pembangunan daerah dan peningkatan kehidupan masyarakat.

Tidak dapat disangkal bahwa dewasa ini peranan perencanaan pembangunan daerah Indonesia menjadi semakin penting. Ada dua alasan utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi: Pertama, adalah karena adanya pelaksanaan otonomi daerah mulai tahun 2001 yang menyebabkan peranan

---

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 531.

<sup>15</sup>M. QuraishSihab, *Tafsir Al-Misbah*, h, 283.



pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kedua, karena semakin banyaknya terjadi pemekaran daerah, maka jumlah daerah itu sendiri dewasa ini juga semakin banyak yaitu sekitar 500 yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota.<sup>16</sup>

Pada tanggal 1 Januari 2001 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaannya, beberapa peraturan pemerintah sudah pula dikeluarkan. Sejak mulai saat itu, pemerintah dan pembangunan daerah di seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralistis dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan. Dewasa ini pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional.<sup>17</sup>

Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang mengedepankan asas desentralisasi. Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri yang didelegasikan dari

---

<sup>16</sup>Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 13.

<sup>17</sup>Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, , h. 13-14.

pemerintah pusat. Dengan adanya kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, maka setiap daerah berhak untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahannya masing-masing. Setiap daerah dapat membuat inovasi atau melakukan terobosan-terobosan tertentu dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Kabupaten Bantaeng sebagai daerah otonom berupaya untuk membangun daerahnya, terutama dalam bidang pembangunan industri khusus di Kawasan Industri Bantaeng atau Bantaeng Industrial Park (BIP). Ini mampu mendatangkan banyak keuntungan baik dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan kualitas hidup masyarakat.

Jalan masuk yang menjadi acuan KIBA ini adalah Perda No. 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng. Pada pasal 38 ayat 2 dalam perda tersebut menyebutkan, “Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa’jukukang”. Inilah acuan pemerintah memberikan peluang kepada investor untuk menanamkan modal mereka untuk membangun industri di Bantaeng.<sup>18</sup> Ini yang menjadi strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka meningkatkan daya tarik investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dalam pengembangan pembangunan, untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng. Untuk itu menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, cepat, dan transparan.

---

<sup>18</sup> [http://belukarhujan.blogspot.co.id/2014/04/risalah-kawasan industri-bantaeng-kiba.html/m=1](http://belukarhujan.blogspot.co.id/2014/04/risalah-kawasan-industri-bantaeng-kiba.html/m=1), (Diakses 25 April 2018 pukul 20:35).

Namun kenyataannya kegiatan investasi di daerah tidaklah mudah dan justru banyak kendala dan hambatan seperti masalah yang dihadapi kurangnya sumber daya manusia, minimnya pendidikan masyarakat, kepastian hukum, dan lapangan pekerjaan. Hal-hal yang demikian yang masih menjadi masalah seiring masuknya investasi asing di Kabupaten Bantaeng. Disisi lain pemerintah Kabupaten Bantaeng terus melakukan gencar promosi daerah baik melalui media, dan menyangkut pembenahan di Kawasan Industri Bantaeng guna untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, cepat, dan transparan.

Peningkatan investasi asing di sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) merupakan langkah awal bagi investasi asing memperbesar peluang dari penguasaan industri di Indonesia. Hal ini dapat menjadi peluang ataupun ancaman bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng karena keterlibatan perusahaan asing seringkali meninggalkan masalah sosial di masyarakat. Walaupun tujuan kerjasama asing dalam industri di Bantaeng mengarah pada pembangunan ekonomi daerah, tetapi tidak dapat dihindarkan konflik sosial juga akan mengancam keberlangsungan kerjasama tersebut, misalnya, dalam sektor ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat besar dikarenakan tingginya kebutuhan kerja, dan masyarakat tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang mencukupi terlebih lagi melihat realitas bahwa di era industri seperti sekarang ini dimana kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pendidikan dan *skill* di dalam masyarakat seperti di Bantaeng itu sendiri, dengan tingkat pendidikan yang masih bisa dikatakan rendah dan tidak merata dan sebagian besar tidak menguasai

laju teknologi khususnya dalam bidang industri maka akan menjadi kendala tersendiri dalam peluangnya meningkatkan tenaga kerja lokal dan investasi asing.

Peningkatan investasi asing di Kabupaten Bantaeng di sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), diharapkan ini membawa dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Bantaeng dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantaeng. Tentunya dalam setiap pembangunan akan membawa beberapa dampak perubahan pada daerah yang dicanangkan pembangunan melalui investasi, sehingga peran pemerintah hendaknya mampu menjadi pengendali dari arus investasi tersebut agar dampak positif dari investasi mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke lapisan sektor ekonomi lainnya.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti “ Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng Dalam Peningkaan Investasi Asing di Sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)’.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Peningkatan Investasi Asing di sektor Kawasan industri Bantaeng (KIBA)?
2. Bagaimana Dampak Keberadaan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).
2. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam meningkatkan investasi asing di wilayahnya.
2. Bagi pihak akademisi setidaknya bisa menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut bahwa dampak dari kawasan industri harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

#### **1. Fokus Penelitian**

Terkait dengan masalah diatas maka penelitian ini akan menfokuskan tentang peran pemerintah dalam peningkatan investasi asing di sektor Kawasan Industri Bantaeng.

#### **2. Deskripsi fokus**

- a. Peran pemerintah daerah dalam menarik investasi asing di sektor kawasan industri sangat menentukan pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat, sejak di berlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. sehingga pemerintah daerah diberi peluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pembangunan ekonomi. Dewasa ini pemerintah daerah dituntut untuk memberikan respons terhadap tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh dunia internasional dengan tetap memperhatikan peraturan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- b. Keberadaan kawasan industri di daerah akan membawa sebuah dampak terhadap masyarakat suatu perubahan atau efek yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang tidak direncanakan diluar sasaran. Dampak sosial dan ekonomi dan budaya akan mempengaruhi suatu aktivitas di sekitar kawasan industri baik itu berdampak positif maupun negatif.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah menelusuri beberapa penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis mengemukakan beberapa diantara yang hampir serupa dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian oleh Muhammad Misbakhul Munir dengan judul “Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah.” Universitas Negeri Semarang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menjadi penentu daya tarik investasi dan merumuskan strategi untuk



mengembangkan kawasan industri. Metode analisis yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Proces* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi iklim investasi di kawasan industri Kendal dalam keadaan belum normal. Dalam keadaan normal seharusnya faktor utama penentu daya tarik investasi di kawasan industri Kendal adalah variabel ekonomi daerah, variabel tenaga kerja dan variabel infrastruktur, bukan variabel kelembagaan dan variabel sosial politik. Faktor yang menjadi penentu daya tarik investasi di kawasan industri Kendal yang paling dominan adalah variabel kelembagaan 28%, diikuti variabel sosial politik 25.9%, variabel infrastruktur 22.1%, variabel tenaga kerja 15% dan terakhir variabel ekonomi daerah 8.9%.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian Muhammad Misbakhul Munir dengan peneliti yaitu dimana titik fokusnya untuk mengetahui faktor yang menjadi penentu daya tarik investasi dan merumuskan strategi untuk mengembangkan kawasan industri. Sedangkan penelitian penulis titik fokusnya adalah peran pemerintah dalam peningkatan investasi asing di kawasan industri Bantaeng serta dampak kawasan industri Bantaeng terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

2. Penelitian oleh Pratiknya dengan judul “Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang.” Universitas di Penegoro Semarang.

---

<sup>19</sup>Muhammad Misbakhul Munir, *Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah, Skripsi*, (Semarang: Fak. Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2015), h. viii.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perangkat peraturan perundangan yang ada sudah cukup menunjang bagi perkembangan kawasan industri dalam menarik minat investasi di kota Semarang, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan kawasan industri di kota Semarang berjalan sesuai dengan harapan, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dan memberikan saran serta masukan kepada pemerintah untuk perbaikan di kemudian hari.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan alasan bahwa kawasan industri merupakan institusi yang menjalankan perannya berdasarkan norma-norma hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana pembangunan kawasan industri berjalan dalam realitanya. Sedangkan data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian Pratiknya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Pratiknya mengkaji tentang untuk mengetahui apakah perangkat peraturan perundangan yang ada sudah cukup menunjang bagi perkembangan kawasan industri dalam menarik minat investasi di Kota Semarang, Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam peningkatan investasi asing di sektor Kawasan Industri Bantaeng, serta dampak Kawasan Industri Bantaeng terhadap

---

<sup>20</sup>Pratiknya, *Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Semarang, Tesis*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007), h. xi.

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

3. Penelitian oleh Anugrah Rahmat dengan Judul “Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing Di Kab. Bantaeng”. Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model investasi penanaman modal asing serta mengetahui prospeknya di Kabupaten Bantaeng. Teknik analisis yang dipakai adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, wawancara dan penelusuran data secara online.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model investasi di Kabupaten Bantaeng yaitu penanaman modal langsung dengan kerjasama *Joint Venture* (perusahaan patungan) yang mengelola Kawasan Industri Bantaeng.<sup>21</sup>

Adapun persamaan dari penelitian Anugrah Rahmat dengan penelitian penulis yaitu dalam konteks prospek penanaman modal asing ini yang termanifestasikan oleh Kawasan Industri Bantaeng terhadap sektor ketenagakerjaan sangat menjanjikan karena dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam peningkatan investasi asing di sektor Kawasan Industri

---

<sup>21</sup>Anugrah Rahmat, *Analisis kebijakan Penanaman Modal Asing Di Kabupaten Bantaeng, skripsi*, (Makassar: Fak. Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin 2015), h. xiii.

Bantaeng (KIBA), Serta dampak Kawasan Industri Bantaeng terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

- 4 Penelitian oleh Arif Lukman H. dengan Judul “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1986-2011”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM), inflasi dan suku bunga terhadap penanaman modal asing di daerah istimewa Yogyakarta periode 1986-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari variable PDRB, PMDN, inflasi, dari suku bunga dari periode 1986-2011 yang penulis peroleh dari berbagai sumber. Model *regreasi ordinary least square* digunakan untuk pengujian hipotesis, dengan menggunakan metode analisis baik metode kualitatif dan kuantitatif.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian Arif Lukman H dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Arif Lukman H titik fokusnya untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM), inflasi dan suku bunga terhadap Penanaman Modal Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1986-2011, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada bagaimana peran

---

<sup>22</sup>Arif Lukman H., *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1986-2011*, skripsi, (Surakarta: Fak. Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012), h. xvii.

pemerintah dalam peningkatan investasi asing di sektor Kawasan Industri Bantaeng Serta dampak Kawasan Industri Bantaeng terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

- 5 Penelitian oleh Munarmi dengan judul “Peran Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, adapun Kepala BPMPD Provinsi Kepri sebagai Key Informan. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian Munarmi dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Munarmi titik fokusnya untuk mengetahui Peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013, Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam peningkatan investasi asing di sektor Kawasan Industri Bantaeng Serta dampak Kawasan Industri Bantaeng terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

---

<sup>23</sup>Munarmi, *Peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013, Skripsi*, (Tanjung Pinang: Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015), h. 2.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### ***A. Landasan Teori***

Dalam rangka untuk mendukung dan mempermudah peneliti untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam penelitian ini tentunya peneliti ingin mengungkapkan teori-teori untuk merumuskan hasil tulisan oleh peneliti dan membantu peneliti menganalisa berbagai data yang akan peneliti dapatkan nantinya. Adapun teori yang peneliti gunakan adalah:

##### **1. Teori Peran**

Teori ini beranggapan bahwa orang dalam hidup bermasyarakat senantiasa berusaha melakukan peran seperti di kehendaki oleh orang lain. Dengan demikian, identitas seseorang adalah dibentuk dalam rangka memberi respon dari perlakuan.<sup>24</sup>

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

---

<sup>24</sup>Sunyoto Usman, *Sosiologi, Syarat, Teori, Dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), h. 59.



- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.<sup>25</sup>

Ketiga hal tersebut sangat menentukan bagaimana seseorang menjalankan peranannya. Hak dan kewajiban merupakan acuan seseorang dalam menjalankan peranan. Perilaku merupakan tindakan-tindakan seseorang berdasarkan hak dan kewajibannya dalam menjalankan peranan.

Sedangkan, menurut Menzies menyebut 3 langkah yang harus dilakukan untuk membuat Analisis dengan berdasarkan pada Teori Peran yaitu:

- a. Mengidentifikasi berbagai harapan yang sangat penting berkaitan dengan topik yang hendak dikaji.
- b. Memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat disosialisasikan kedalam harapan-harapan tersebut dan bagaimana mereka membangun *a self-conception*.
- c. Mendiskusikan tindakan yang muncul dari harapan tersebut, dengan asumsi situasi yang melingkupi secara internal tidak berubah.<sup>26</sup>

Dari pendapat diatas tersebut, menandakan bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Pemerintah di bentuk oleh masyarakat, pemerintah berperan dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada pelaksanaan tugas

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 210-211.

<sup>26</sup>Sunyoto Usman, *Sosiologi, Syarat, Teori dan metodologi*, h. 61.

yang sangat luas dan kompleks, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual, pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan yaitu menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya.

## 2. Otonomi Daerah

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*Self government*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.<sup>27</sup>

Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.<sup>28</sup>

- a. Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang terpilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan

---

<sup>27</sup>Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, h. 106.

<sup>28</sup>Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 9-10.

masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Demokratisasi pemerintah juga berarti transparansi kebijakan, artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang dipikul, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal.

- b. Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
- c. Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah diberi peluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam memberikan pelayanan publik. Dewasa ini pemerintah daerah dituntut untuk memberikan respon terhadap tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh dunia internasional dalam berbagai bidang. Respon mereka tentu saja bisa mempengaruhi keseluruhan bangunan hubungan luar negeri dan diplomasi

Indonesia dalam arti yang positif maupun negatif. Secara positif hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa mendukung kebijakan pemerintah pusat tetapi secara negatif hubungan itu bisa juga membawa kerugian bagi rakyat Indonesia melalui proses eksploitasi akibat ketidaksertaan posisi dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah.<sup>29</sup>

UU Nomor 32 Tahun 2004 secara jelas mengatur pembagian kekuasaan atau kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pengadilan, kebijakan keuangan dan fiskal serta urusan keagamaan. Pasal 13 dan 14 mengatur kewenangan pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota yang mencakup antara lain, perencanaan pembangunan, ketertiban umum dan keamanan masyarakat, infrastruktur lokal, kesehatan, pendidikan, masalah sosial, perubahan, tanah, lingkungan hidup, kependudukan, pelayanan investasi dsbnya. Disamping itu ada juga pengaturan tentang hubungan antara pemerintah daerah dengan aktor-aktor internasional.<sup>30</sup>

### **3. Investasi Asing atau *Foreign direct Investment***

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang penanaman modal yang lama, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan

---

<sup>29</sup>Aleksitus Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h, 127-128.

<sup>30</sup>Aleksitus Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, , h, 128.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan perbedaan pengaturan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka dalam UU Penanaman Modal yang berlaku sekarang, masalah penanaman modal asing maupun dalam negeri diatur dalam kesatuan. Perbedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih dilakukan dalam konteks mengidentifikasi asalnya modal tersebut, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau dari sumber luar negeri atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman modal tersebut, apakah investor lokal/domestik atau investor asing.<sup>31</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yaitu perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan dari segi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil. Pada awal tahun 70-an sampai akhir 80-an, Jepang melakukan investasi besar-besaran di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti *Freeport Mc Morant*, *Shell*, *Mobil Oil*, mulai menanamkan sahamnya secara besar-besaran di Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), h. 11.

<sup>32</sup>Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 14.

Investasi asing merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke dalam negeri baik yang melalui investasi langsung (*Direct Investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio*). Adapun jenis investasi asing adalah :

1. Investasi modal swasta asing secara langsung *Foreign Direct Investment* (FDI) atau dapat juga disebut investasi di sektor *riil* adalah investasi yang langsung ditanamkan di industri atau bidang usaha tertentu seperti pertambangan, property, pertanian, dan lain sebagainya. Investasi di sektor *riil* sangat penting karena dapat memberi manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan industri, dan penggarapan berbagai sumber daya ekonomi. Itu ada kemungkinan pemerintah akan mengalami guncangan ekonomi apabila suatu waktu dana tersebut ditarik kembali oleh investor dalam jumlah besar. Selain itu, investasi *portofolio* juga sulit menjangkau kesejahteraan rakyat.
2. Investasi Portofolio (*portofolio investment*)

Investasi tidak langsung banyak dilakukan dalam bentuk saham korporasi, surat obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Utang Negara (SUN). dana dari investasi *portofolio* umumnya bersifat jangka pendek (*hot money*) dan dapat ditarik kembali oleh investor (arus balik)

setiap saat apabila ada negara lain yang menawarkan keuntungan lebih besar. Oleh karena ada peningkatan yang berarti di sektor *riil*.<sup>33</sup>

#### 4. Konsep Developmentalisme

Developmentalisme ini ditandai dengan masa kemerdekaan negara-negara dunia ketiga secara fisik. Namun pada era ini dominasi negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan proses perubahan sosial. Sesungguhnya teori pembangunan ataupun paham developmentalisme menjadi bagian dari media dominasi, karena teori tersebut direayasa untuk menjadi pradigma dominan untuk perubahan sosial dunia ketiga oleh negara utara. Dengan kata lain, pada fase ini kolonialisasi tidak terjadi secara fisik, melainkan melalui hegemoni yakni dominasi secara pandang dan ideologi serta *disourse* yang dominan melalui produksi pengetahuan.<sup>34</sup>

Konsep pembangunan merupakan terjemahan dari apa yang dikenal dengan developmentalisme atau memiliki makna yang sama seperti modernitas (*modernity*). Dalam praktiknya, modernisasi sering kali atau cenderung tidak menghargai, melupakan bahkan membuang atau memusuhi tradisionalisme dan kearifan lokal. Modernisasi cenderung mengorbankan dan membebani generasi mendatang dengan cara menghancurkan kelestarian lingkungan dan mencemari ekosistem yang mengancam sumber daya alam. Modernisasi yang dimulai di Eropa dan di Amerika Utara adalah pola pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara yang saat ini berstatus sebagai negara maju. Ia dilakukan dengan cara eksploitasi sumber daya alam melalui skema bantuan asing di negara-negara

---

<sup>33</sup>Ahyarsuhendar.blogspot.com/2010/06/tnc-investasi-asing-penanaman-modal.html (Diakses 03 Juni 2018 pukul 19:30).

<sup>34</sup>Effendi Sirajuddin, *Memerangi Sindrom Negara Gagal*, h. 27.

jajahan, yang setelah perang Dunia II disebut dengan negara berkembang. Pada tahun 1940-an dan khususnya awal tahun 1950-an dan 1960-an, istilah developmentalisme masih diidentikkan pertumbuhan (*growth*) modernisasi, perubahan, demokrasi, produktivitas, industrialisasi, dan sejumlah perubahan historis yang mirip. Secara historis-genealogis, ide developmentalisme (pembangunisme) sebenarnya telah berakar cukup lama dan kuat dari nilai-nilai kapitalisme yang tumbuh sejak era ekonomi merkantil yang mendominasi sistem perdagangan di Eropa pada abad ke-15. Sebagai *style of governance*, pembangunisme menitikberatkan pada mekanisme produktivitas ekonomi dan karena itu memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk penyempitan ruang sosial dan meminimalkan hal-hal yang menimbulkan konflik sosial. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan aparatur negara dengan desain kelembagaan yang dapat menjamin terciptanya mekanisme yang mampu meminimalisasi bahkan meniadakan konflik horizontal dan ideologi dengan mengutamakan *consensus* dan ketertiban.<sup>35</sup>

Makna developmentalisme mengalami perkembangan dari konsep ideal tentang sebuah tatanan kesejahteraan masyarakat yang diformulasikan oleh negara-negara barat. Format kesejahteraan ini kemudian mengalami perdebatan ketika developmentalisme sedikit banyak dipraktekkan ketika zaman orde baru berkuasa. Perdebatan ini terjadi karena pada dasarnya makna developmentalisme

---

<sup>35</sup>Warjio, *Politik Pembangunan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 59-60.



dan kesejahteraan sangat tergantung dari konteks dimana istilah tersebut digunakan dalam melihat keadaan.<sup>36</sup>

Menurut Arief Budiman, di Indonesia kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Sering kali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Bukan hanya itu saja, pembangunan sering kali bahkan dijadikan sebagai alat atau ideologi tertentu untuk meredam daya kritis individu atau masyarakat.<sup>37</sup>

Keberadaan pembangunan di level lokal, mengisyaratkan bahwa pembangunan tidak didominasi oleh pusat tapi juga di masyarakat bawah. Kenyataan ini menegaskan bahwa realitas politik dalam konteks pembangunan juga ada di level lokal. Realitas politik di level lokal bisa menegaskan beberapa hal. *Pertama*, pembangunan di level lokal masih dipengaruhi oleh elit atau kepentingan pusat. *Kedua*, realitas politik dalam pembangunan di level lokal berdiri otonom dengan kemampuannya secara mandiri dengan tetap menjadi bagian dari pusat kekuasaan. *Ketiga*, realitas politik dalam pembangunan di tingkat lokal dipengaruhi oleh kepentingan luar negara.<sup>38</sup>

Menurut Siti Aminah, realitas pemerintahan merupakan bagian yang juga di dalam level lokal ini. Bagaimana pemerintahan lokal menjalankan fungsi-fungsinya dan mempertanggungjawabkan peranannya kepada masyarakat/publik.

---

<sup>36</sup>Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h. 13.

<sup>37</sup>Warjio, *Politik Pembangunan*, h. 91.

<sup>38</sup>Warjio, *Politik Pembangunan*, h. 186-187.

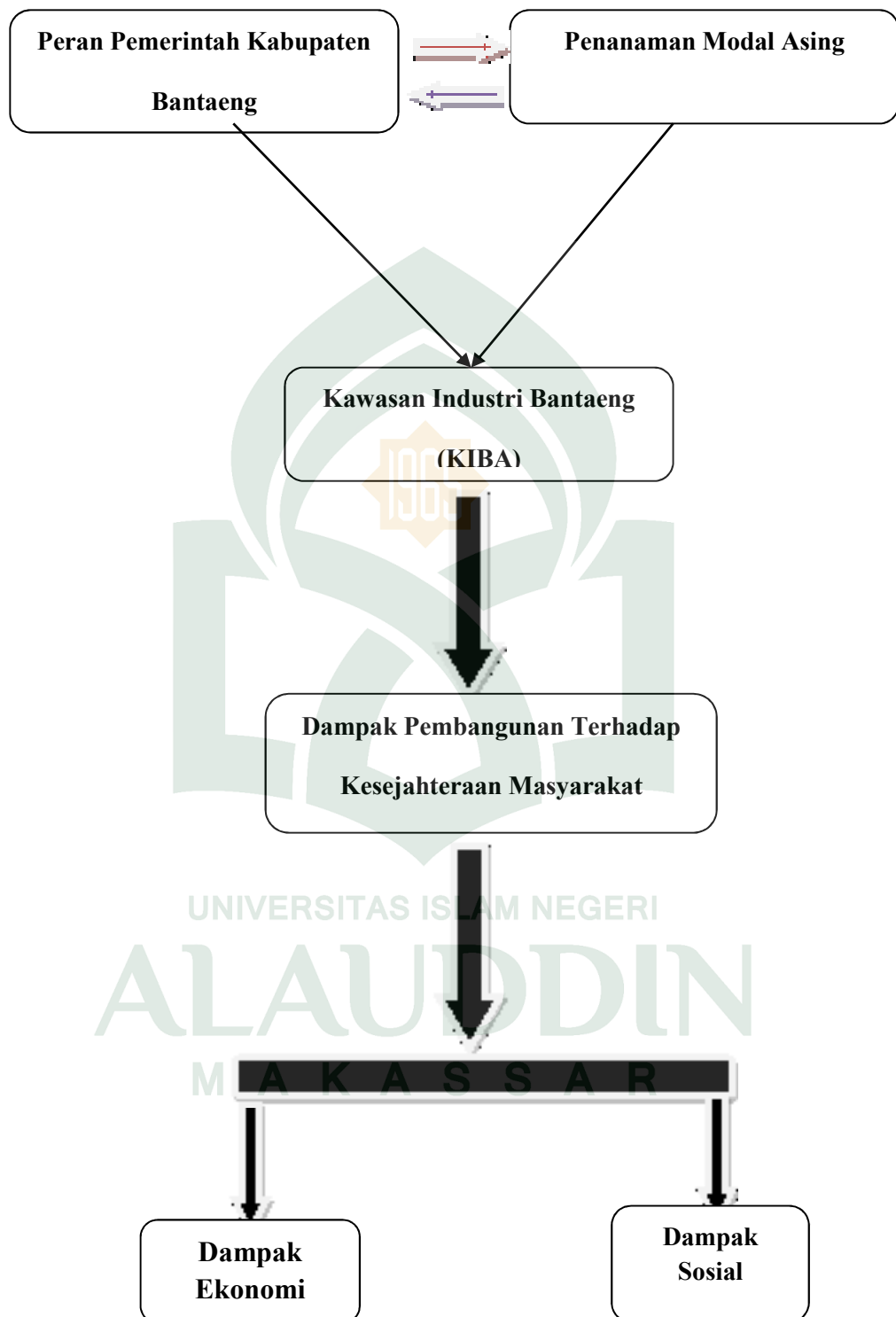
Setiap tingkat lokal dalam menjalankan urusan pemerintahan termasuk pembangunan secara berbeda-beda, sehingga ini menjadi salah satu pokok bahasan yang dipelajari dalam level lokal dan hubungan pusat dan daerah. Terlihat minat baru antara pemerintah nasional dan badan-badan pembangunan internasional dalam menyelenggarakan desentralisasi administratif, sebagai bentuk transfer kuasa, tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga lokal setempat dan aktor non-negara, yang melibatkan swasta dan masyarakat ditingkat akar rumput. Analisis atau kajian politik pembangunan di tingkat lokal relevan menjadi salah satu fokus dalam politik pembangunan karena mengenalkan dan menyediakan konsep-konsep untuk mempelajari relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat, eksekutif, dan lembaga perwakilan politik (legislatif), antara pemerintah provinsi dan kabupaten, kota serta sampai pada tingkat desa. Peranan kepala-kepala daerah dan jajarannya menjadi penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup>Warjio, *Politik Pembangunan*, h. 186-187.

## B. Kerangka Konseptual



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.<sup>40</sup>

### **B. Lokasi penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng. Tepatnya di Kecamatan Pa'jukukang dengan menganalisis peran pemerintah dalam peningkatan investasi asing di Kawasan Industri Bantaeng.

### **C. Jenis Data**

- a. Data primer yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penulis dan hasil observasi, data primer pada dasarnya memilih metode untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan, dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh

---

<sup>40</sup>Lisa Harrison. *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 102.

pihak lain. Peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui sumber data sekunder.<sup>41</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu:

##### **1. Metode Observasi**

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

##### **2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis : sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Mudrarajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga 2009), h. 148.

<sup>42</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2004), h. 180.

### 3. Dokumentasi

Yaitu cara untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan metode dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan.

### E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif.<sup>43</sup>

Adapun tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

---

<sup>43</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.223.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 110.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak  $\pm 120 \text{ km}^2$  arah selatan Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi  $5^{\circ}21'13''$ -  $5^{\circ}35'26''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}51'42''$ -  $120^{\circ}05'27''$  Bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Bantaeng adalah  $395,83 \text{ km}^2$ .

Wilayah Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi geografisnya, Kabupaten Bantaeng memiliki batas-batas:

- a. Sebelah Utara - Kabupaten Gowa dan Bulukumba;
- b. Sebelah Selatan - Laut Flores;
- c. Sebelah Barat – Kabupaten Jeneponto;
- d. Sebelah Timur – Kabupaten Bulukumba.

Wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi 8 wilayah kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Bissappu ( $32,84 \text{ km}^2$ )
- b. Kecamatan Uluere ( $67,29 \text{ km}^2$ )
- c. Kecamatan Sinoa ( $43 \text{ km}^2$ )
- d. Kecamatan Bantaeng ( $28,85 \text{ km}^2$ )
- e. Kecamatan Eremerasa ( $45,01 \text{ km}^2$ )



- f. Kecamatan Tompobulu (76,99 km<sup>2</sup>)
- g. Kecamatan Pajukukang (48,90 km<sup>2</sup>), dan
- h. Kecamatan Gantarangkeke (52,95 km<sup>2</sup>).<sup>45</sup>

## **2. Keadaan penduduk**

Penduduk Kabupaten Bantaeng berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 185.581 jiwa. Di bandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan sebesar 0,58 persen. Angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 94, yang berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 96.087 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki 89.494 jiwa.

Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 46 desa dan 21 kelurahan, yaitu: Kecamatan Bissappu (4 desa dan 7 kelurahan), Uluere (6 desa), Sinoa (6 desa), Bantaeng (1 desa dan 8 kelurahan), Eremerasa (9 desa), Tompobulu (6 desa dan 4 kelurahan), Pa'jukukang (10 desa), dan Gantarangkeke (4 desa dan 2 kelurahan).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2018, BPS

<sup>46</sup> Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2018, BPS

Adapun Jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng 2013-2017 adalah:

<b>Kecamatan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bissappu	31 473	31 685	31 908	32 299	32 485
Uluere	11 004	11 007	11 155	12 291	11 357
Sinoa	12 034	12 116	12 201	12 350	12 422
Bantaeng	37 362	37 611	37 836	38 341	38 561
Eremerasa	18 941	19 069	19 203	19 439	19 551
Tompobulu	23 316	23 473	23 639	23 929	24 067
Pa'jukukang	29 525	29 723	29 933	30 300	30 474
Gantarangkeke	16 145	16 252	16 368	16 568	16 664
<b>Jumlah</b>	<b>179 800</b>	<b>181 006</b>	<b>182 283</b>	<b>184 517</b>	<b>185 581</b>

Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2018, BPS

Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka sebanyak 5.460 jiwa, sehingga tingkat pengangguran mencapai 5,23 persen. Tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki-laki. Tingkat pengangguran perempuan mencapai 6,56 persen, sedangkan laki-laki mencapai 4,14 persen.<sup>47</sup>

Adapun jumlah penduduk berumur 15 Tahun Keatas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Bantaeng 2017 adalah:

---

<sup>47</sup> Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2018, BPS

1	Tidak/Belumsekolah/tamat	61 518	1 780
2	Sekolah Menengah Pertama	11 077	952
3	Sekolah menengah Keatas	11 585	1 684
4	Sekolah menengah atas	3 447	0
5	Diploma I/II/III/Akademi	1 501	302
6	Universitas	9 819	742
<b>Jumlah</b>		<b>98 947</b>	<b>5 460</b>

Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2018, BPS

### 3. Nama Sungai Yang Lewat dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Bantaeng

Sebagai daerah dengan luas yang relatif terbatas di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Bantaeng hanya memiliki 11 sungai yang melintasi beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Adapun sungai sungai dimaksud antara lain:

<b>Nama Sungai</b>	<b>Panjang</b>	<b>Kecamatan yang Dilintasi</b>
Pamosa	1,75	Tompobulu, Gantarangkeke, Pa'jukukang
Turung Asu	7,40	Tompobulu, Gantarangkeke, Pa'jukukang
Balang Sikuyu	10,80	Sinoa, Bissappu, Bantaeng
Panaikang	11,75	Sinoa, Bissappu
Kalamassang	14,20	Tompobulu, Gantarangkeke, Pa'jukukang
Lemoa	14,45	Uluere, Bissappu
Biangkeke	20,45	Tompobulu, Gantarangkeke, Pa'jukukang
Calendu	20,70	Bantaeng, Eremerasa
Bialo	43,30	Tompobulu, Gantarangkeke
Nipa-Nipa	25,15	Tompobulu, Gantarangkeke, Pa'jukukang

*Sumber :Profil Kecamatan Pa'jukukang Tahun 2018*

#### 4. Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bantaeng

Sumber daya alam di Kabupaten Bantaeng didominasi oleh bahan galian bangunan yang terdiri dari 8 bahan yaitu:

##### A. Pasir Besi

Pasir besi merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan berbagai jenis logam, selain bermanfaat dalam industri logam dasar, pasir besi digunakan pula sebagai bahan campuran pembuatan semen, keterdapatannya pasir besi tersebut sangat mudah dikenali di lapangan, karena material ini tertarik oleh magnet. Pasir besi tersebar di sepanjang pantai selatan Bantaeng. Endapan bahan galian pasir besi di daerah penyelidikan, dijumpai di daerah pinggiran pantai mulai dari pantai barat di sekitar tangnga-tangnga hingga pantai timur di muara sungai lamalaka.

##### B. Batu Apung

Batu apung digunakan sebagai batu gosok dan bahan *abrasive* dalam industri pembuatan cat, industri kimia, industri logam dan plastik, karet, gelas dan kaca, furniture, garmen, kulit, elektronik dan pertanian, batu apung banyak dijumpai di daerah lanyying hingga lereng barat gunung Laduong. Lokasi bahan galian dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat hingga ke kampung Lanyying kemudian melanjutkannya dengan berjalan kaki sekitar 1 jam ke lereng gunung Laduong kearah utara dengan kemiringan lereng yang tidak relatif tidak terlalu terjal.

### C. Andesit

Hasil analisis kuat (*Compression Strength*) oleh ahli riset dan standarisasi industri dan perdagangan Makassar menunjukkan bahwa bahan galian andesit mempunyai kuat tekan  $478 \text{ kg/cm}^2$  yang berarti bantuan ini layak dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi dan bahan bangunan. Bahan galian andesit dijumpai tersingkap dan tersebar di kecamatan yakni dusun Campagalo, desa Bangkalalo, Kelurahan Bontojaya, dusun Pundingin, Karamaja, Pamilangan Kelurahan Bontolangkasa, dusun Bungung katammung, Kelurahan Bonto lebang, dusun Talakayya, Moncong loka, desa Bonto tangnga, Kampung Bugis, dusun Bonto tangnga Kelurahan Bontomanai. Kecamatan Eremerasa yakni di dusun Paccammi dan desa Barua.

### D. Tufa

Lapukan bahan galian berupa tufa merupakan sebagian telah menjadi feldspar yang dapat dijadikan bahan pembuatan gerabah. Tufa yang masih kompak dapat dijadikan batu hias dinding eksterior setelah dipotong. Bahan galian ini di daerah penyelidikan terletak pada bagian barat dengan penyebaran kearah utara-selatan dan dengan penyebaran kearah utara-selatan dan setempat pada bagian timur laut meliputi: Rumbia, Lembang manai, B. Passaukang, Bonto manai, Tompobulu, Loka, Kassi, B. Lokakeke dan Biring romang.

#### E. Lempung

Endapan bahan galian lempung di daerah penyelidikan di tambang secara setempat-setempat di sekitar pemukiman dan perkebunan penduduk. Berdasarkan kondisi lahan tersebut, maka tidak semua cadangan bahan galian ini dapat ditambang, mengingat penyebarannya sebagian merupakan budi daya penduduk. Lempung telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk membuat batu bata. Bahan galian lempung dikenal pula dengan nama tanah liat. Daerah penyebaran endapan terletak pada tofografi yang relatif datar hingga bergelombang lemah di bagian tenggara daerah penyelidikan, sebaran endapan sebagian merupakan wilayah pemukiman, perladanan dan perkebunan. Kenampakan endapan lempung terdiri 2 lapisan. Lapisan bagian atas sebagai batu pasir lempungan, bersifat mudah lepas, kaku dan ringan dalam keadaan kering dengan lebar singkapan 1,5 meter. Penyebaran endapan lempung/tanah liat daerah penyelidikan menyebar pada bagian selatan Kecamatan Tompobulu dan Pa'jukukang, tepatnya di daerah Kalammassang, Kampung beru, Ujung katinting, dan Kassi-Kassi.

#### F. Skoria

Bahan galian skoria ditambang oleh masyarakat setempat secara manual sebagai bahan baku pembuatan: batu nisan, batu lesung, batu pecah, batu pondasi, dan patung yang banyak diminati oleh orang cina. Kegiatan penambangan telah berlangsung turun temurun, dan sudah menjadi salah satu pencaharian masyarakat di sekitarnya. Hasil produksinya dipasarkan

secara lokal dan luar daerah. Bahan galian ini terdapat di dusun Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu, letaknya berada di tepi jalan beraspal sebelah utara poros jalan Makassar-Bulukumba sehingga sangat mudah dicapai dengan menggunakan roda 4.

#### G. Batu Pasir

Batu pasir kompak dapat dijadikan batu hias dinding eksterior setelah dipotong. Batu pasir di daerah penyelidikan tersingkap pada bagian Tenggara daerah penyelidikan, dengan penyebaran kearah Timur. Barat tepatnya di daerah Pa'jukukang, Bulu Katinting hingga keperbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.

#### H. Sirtu

Sirtu dari endapan sungai purba terdapat di dusun Mappilawing dan Sampara, sedangkan sirtu yang terendapkan disepanjang sungai terdapat di dusun Paropi sampai Kalimbaung dan Allu, dusun Beloparang, Kampung Parang Tinotowa. Lokasi tersebut semuanya dapat dicapai dengan kendaraan roda empat, karena ditunjang dengan jalan beraspal dan jalan tanah.<sup>48</sup>

### 5. Profil Kecamatan Pa'jukukang

Kecamatan Pa'jukukang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Bantaeng yang dicanangkan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dengan luas wilayah 48,90 Km<sup>2</sup>. Adapun rincian luas wilayah menurut 10 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Pa'jukukang adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Masterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, 2014, h. 4-27 - 4-31.

- a. Desa Rappoa luas wilayah 3,25 Km<sup>2</sup>
- b. Desa Biangloe Luas wilayah 3,93 Km<sup>2</sup>
- c. Desa Lumpangan Luas wilayah 4,70 Km<sup>2</sup>
- d. Desa Biangkeke luas wilayah 3,31 Km<sup>2</sup>
- e. Desa Nipa-Nipa luas wilayah 6,12 Km<sup>2</sup>
- f. Desa Pa'jukukang luas wilayah 5,85 Km<sup>2</sup>
- g. Desa Borongloe Luas wilayah 8,40 Km<sup>2</sup>
- h. Desa Papanloe luas wilayah 7,35 Km<sup>2</sup>
- i. Desa Baruga luas wilayah 3,17 Km<sup>2</sup>
- j. Desa Batukaraeng luas wilayah 3,02 Km<sup>2.49</sup>

a. Batas Wilayah

Ibu kota Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terletak di Desa Nipa-Nipa yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gantarangkeke dan Kabupaten Bulukumba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Eremerasa.

---

<sup>49</sup>Profil Kecamatan Pa'jukukang 2018.



b. Keadaan Penduduk Kecamatan Pa'jukukang

Penduduk Kecamatan Pa'jukukang tidak kalah banyak dengan penduduk kecamatan lainnya, dengan jumlah Penduduk sebanyak 31.385 Jiwa, dengan jumlah pepulasi penduduk desa sebagai berikut:

DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
RAPPOA	461	796	1.623
BIANGKEKE	1.792	1.826	3.618
PA'JUKUKANG	1.108	1.209	2.317
BARUGA	2.577	2.521	5.098
BATUKARAENG	1.108	1.209	2.317
PAPANLOE	1.583	1.529	3.112
BIANGLOE	1.108	1.209	2.317
BORONGLOE	2.090	2.103	4.193
LUMPANGAN	1.498	1.381	2.879
NIPA-NIPA	1.955	1.956	3.911
<b>JUMLAH</b>	<b>14.742</b>	<b>15.118</b>	<b>31.385</b>

Sumber :Profil Kecamatan Pa'jukukang Tahun 2018

Kepadatan penduduk dalam wilayah Kecamatan Pa'jukukang 616 Km<sup>2</sup>.<sup>50</sup>

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Kasi pembangunan dan ekonomi di kantor camat Pa'jukukang:

*“Dengan kebanyakan masyarakat Pa'jukukang dengan pekerjaan Bertani, Beternak dan bersawah, nelayan, petani rumput laut, Masyarakat Pa'jukukang bisa dikatakan sebagai masyarakat yang bergantung pada air hujan, karena kecamatan pa'jukukang merupakan salah satu daerah yang susah air ketika musim kemarau datang, sehingga membuat*

<sup>50</sup>Profil Kecamatan Pa'jukukang 2018.

*masyarakat banyak yang menganggur dan banyak pula yang keluar negeri untuk menafkahi keluarganya.*<sup>51</sup>

Menurut hasil wawancara tersebut bahwa keadaan penduduk di Kecamatan Pa'jukukang yang paling kebanyakan bertani, bersawah, dan lain-lain sebagai sumber penghasilannya, sangat ditentukan oleh keadaan cuaca, karena ketika musim kemarau melanda, maka lahan akan kekeringan, dan tumbuhan pun banyak yang mati terutama untuk petani dan, sehingga masyarakat banyak yang menganggur bahkan banyak yang keluar negeri mencari rezeki.

## **B. Peran Pemerintah dalam Peningkatan Investasi Asing di Kawasan Industri Bantaeng**

Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) melibatkan peran kerjasama pemerintah dan swasta. Rancangan pembangunan kawasan membutuhkan dukungan berbagai pihak serta didukung fasilitas infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah dan kemudahan dalam perizinan daerah. Kehadiran investasi asing di Kabupaten Bantaeng, tidak serta merta berjalan dengan sendiri tanpa adanya peran dari pemerintah Kabupaten Bantaeng, dalam peningkatan investasi asing yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat. Ada pun peran dari pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam peningkatan investasi asing, yaitu:

### **1. Kebijakan**

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk

---

<sup>51</sup>Abdul Rasyid, *Wawancara*, (Kasi Pembangunan dan ekonomi di Kantor Kecamatan Pa'jukukang), tgl 10 September 2018, Pukul 09:30 Wita.

mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>52</sup>

Secara garis besar, perencanaan pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan dan memproses informasi dari tingkat yang lebih bawah. Dengan demikian setiap badan dan dinas yang berwenang harus secara serempak atau simultan terlibat dalam memadukan dua gugus kekuatan, yang kadang-kadang tidak selaras bahkan bertentangan. Visi dari instansi pemerintah tersebut perlu ditanamkan pada seluruh unsur organisasi sehingga menjadi (milik) bersama yang pada gilirannya akan mampu menggerakkan dan mengarahkan segala sumber daya pemerintahan Kabupaten Bantaeng guna meraih cita-cita bersama. Adapun visi yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah:

**“Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dibagian selatan Sulawesi Selatan  
Tahun 2018”**

Dari pernyataan visi tersebut, mengandung makna bahwa dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan tahun 2018, Kabupaten Bantaeng dengan memanfaatkan segala potensi ditargetkan menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa Kabupaten Bantaeng sebagai titik pandang dan pilihan utama para investor untuk menanamkan modalnya, para wisatawan untuk

---

<sup>52</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 20.

berkunjung ke Bantaeng, para petani yang butuh benih unggul, dan sebagai pusat layanan kesehatan, serta pusat keunggulan lainnya.<sup>53</sup>

Terkai dengan kebijakan arahan pengembangan Kawasan Industri Bantaeng, peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng, dalam pasal 39 ayat 2, perda tersebut menyebutkan Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang. Inilah acuan pemerintah memberikan peluang kepada investor untuk menanamkan modal untuk membangun Kawasan Industri di Bantaeng.<sup>54</sup>

Peraturan/regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan Kawasan Industri Bantaeng adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, diantaranya yaitu pasal 14 ayat (1) yaitu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia melalui perwilayahan industri.<sup>55</sup> Sehingga pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan sebuah inovasi pembangunan Kawasan Industri.

Kawasan perencanaan terletak di lingkungan kawasan pertanian yang cukup jauh dari pemukiman penduduk.<sup>56</sup> Kabupaten Bantaeng yang ingin menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di bagian selatan Sulawesi Selatan, dengan

---

<sup>53</sup>Kementerian Perindustrian Republik Indonesia , *Masterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, h. 2-35.

<sup>54</sup>Kementerian Perindustriaan Republik Indonesia, *Massterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, h. 2-37.

<sup>55</sup>Kementerian Perindustriaan Republik Indonesia, *Massterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, h. 1-3.

<sup>56</sup>Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Masterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, h. 4-1.

inovasi pembangunan Kawasan industri tepatnya di Kecamatan Pa'jukukang sesuai dengan RTRW Kab. Bantaeng, dengan salah satu faktor karena seiring lahan pertanian semakin berkurang dikarenakan pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Sesuai dengan wawancara Ibu Iffar Rafidah Djaffar, ST. Selaku Kabag Perindustrian dengan peneliti adalah:

*“Bantaeng itu kecil, Lonjakan penduduk meningkat dan kebutuhan lahan untuk pertanian pasti akan berkurang, kalau Bantaeng terus memposisikan daerah sebagai penghasil pertanian, kedepannya itu dengan luas pertanian akan berkurang dikarenakan penduduk meningkat, jadi tidak ada keseimbangan antara, kebutuhan penduduk dengan lahan tersedia, karena lahannya tetap dan penduduk yang bertambah, ketika kita masih tetap di pertanian otomatis pendapatan Bantaeng dari pertanian pasti akan berkurang, jadi, salah satu inovasi pemerintah Bantaeng yaitu bagaimana memberdayakan luas lahan pertanian yang terbatas dan menumbuhkan hilirisasi produk-produk pertanian, jadi bukan cuma sampai di bahan baku atau sampai dengan menjualnya, tapi bagaimana kita bisa mengelola hasil pertanian makanya muncul kawasan industri pengolahan, makanya muncul kawasan industri Bantaeng, selain inovasi benih pertanian”.*<sup>57</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanian sekarang menjadi semakin kurang dikarenakan pertumbuhan penduduk semakin bertambah sehingga lahan semakin berkurang, jadi pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan sebuah inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan sebuah inovasi pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dengan memanfaatkan lahan yang tandus. Senada dengan Bapak Andi Lukman Agung, ST adalah:

*“Luas lahan kita dibandingkan dengan kabupaten tetangga kita misal Bulukumba, Takalar pasti kita kalah, sehingga kita kebanjiran daripada kita menghasilkan dari pertanian karena luas lahan kita terbatas, dan salah satu alternatifnya industri harus masuk, karena dimana-mana daerah*

---

<sup>57</sup>Iffah Rafidah Djaffar, ST, Wawancara, (Kabid Perindustrian di Kantor Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng), Tgl 12 September 2018, Pukul 10:00 Wita.

*kalau industri masuk akan mendongkrak perekonomian suatu daerah dan mensejahterahkan masyarakat makanya kami membuka lebar-lebar untuk investasi asing masuk di Bantaeng”<sup>58</sup>*

Hasil wawancara diatas bahwa dengan masuknya industri akan memberikan sebuah keuntungan untuk suatu daerah, sehingga pihak pemerintah mencanangkan suatu pembangunan industri yang dikenal dengan Kawasan Industri Bantaeng untuk menambah perekonomian daerah dan untuk membuka kesempatan tenaga kerja di Kabupaten Bantaeng.

Arah kebijakan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran dari masing-masing misi, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun atau selama periode RPJM Kabupaten Bantaeng. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.<sup>59</sup>

Hal ini ditegaskan oleh Iffah Rafidah Djafar, ST. selaku Kabid Perindustrian Kabupaten Bantaeng dalam wawacaranya dengan penulis yang berkata :

*“Kecamatan Pa’jukukang sebagai daerah yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai pembangunan kawasan industri besar, yang tertuang dalam peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dalam sebuah daerah yang selama ini belum tersentuh, mencoba untuk memanfaatkan potensi alam dengan menarik investasi asing dalam pembangunan kawasan industri Bantaeng dengan memenuhi syarat-syaratnya seperti dalam pembebasan lahan dengan luas 3000 Ha, dan kepastian hukum karena*

---

<sup>58</sup>Andi Lukman Agung, ST., *Wawancara*, (Seksi Ind. Logam, Mesin, Elektronika dan Bahan Galian Non Logam di Bidang Perindustrian), tgl 12 September 2018, Pukul 10:00 Wita.

<sup>59</sup> Kementerian Perindustriaan Republik Indonesia, *Massterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, h. 2-36.

*ketiadaan kepastiaan hukum akan menyulitkan perenanaan usaha panjang mereka yang ada di Kecamatan Pa'jukukang.*<sup>60</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng berupaya untuk memberikan sebuah kemudahan bagi pihak investor untuk masuk dalam pembangunan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang. Dalam proses kerjasama investasi penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng ini telah melibatkan beberapa pihak yang saling bekerjasama untuk mendukung investasi ini. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu pihak yang bekerjasama memberikan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan investor, seperti pembebasan lahan dan kepastian hukm bagi investor agar merasa nyaman dan terjamin dalam melakukan penanaman modal di Kawasan Industri Bantaeng.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing pada Pasal 14 yang berbunyi:

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

Adapun wawancara dengan Ibu Fatmawaty, ST selaku Kabid Perizinan dan Non Perizinan dalam wawancara dengan peneliti:

---

<sup>60</sup>Iffah Rafidah Djaffar, ST, *Wawancara*, (Kabid Perindustrian di Kantor Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng), Tgl 12 September 2018, Pukul 10:00 Wita.

<sup>61</sup>Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing Pasal 14 h.13.



*”kebijakan dalam kawasan industri di Bantaeng ini, tentunya harus berdasarkan pada perundang-undangan tentang penanaman modal asing teruntana meningkatkan komitmen antar instansi pemerintahan Kabupaten Bantaeng dalam menarik investasi asing, sehingga tercipta iklim investasi yang cepat dan transparan serta memberi kepastian hukum bagi investor asing yang berinvestasi di kawasan industri Bantaeng ini, karena ketiadaan jaminan kepastian hukum, maka investor juga tidak mau menanamkan modalnya di suatu daerah.”<sup>62</sup>*

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng membuat kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat dan berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk investor asing dalam menanamkan modalnya di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan keberadaan investor sehingga pemerintah Kabupaten Bantaeng mengupayakan agar investor merasa aman dalam menanamkan modalnya dengan memberikan kepastian hukum dan menjadi daya tarik tersendiri untuk investor asing masuk dalam pembangunan kawasan industri Bantaeng.

Senada dengan Bapak Irfan Fajar, S.Sos, selaku kepala Plt. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa:

*“Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka meningkatkan daya tarik investor masuk dengan meningkatkan minat investor melalui promosi, optimalisasi system dan prosedur pelayanan perizinan investasi dan meningkatkan jejaring investasi baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi investor”<sup>63</sup>*

---

<sup>62</sup>Fatmawaty, S.T., *Wawancara* (Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng), Tgl, 17 september 2018, Pukul 10:30 Wita.

<sup>63</sup>Irfan Fajar, S.Sos, *Wawancara* (Kepala Dinas, Plt. Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng), tgl 17 September 2018, Pukul 13:30 Wita.



Besarnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada swasta (*wholesaler*) merupakan insentif investasi. Hal ini guna mendorong keterlibatan swasta di dalam pengembangan infrastruktur (Terminal dan perdagangan).<sup>64</sup>

Percepatan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melakukan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, baik perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Andi Lukman Agung, ST, selaku Kepala seksi di Bidang Perindustrian yang mengatakan:

*“kami sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan mau perseorangan maupun patungan yang pasti perusahaan itu masuk, tapi lebih tepatnya investor yang masuk di kabupaten Bantaeng, dia merupakan model konsorsium atau joint venture”*.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa investor yang masuk dalam Kawasan Industri Bantaeng melakukan kerjasama patungan dalam konsorsium, yang dimana investor asing atau investor dalam negeri atau pemda bersama-sama turut andil dalam pembiayaan dan pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng.

Pola pembiayaan yang sesuai dengan kondisi daerah dan pilihan kemitraan usaha antara pemda dan swasta adalah sebagai berikut:

1. *Joint Venture*, pemda dan swasta bersama-sama turut andil dalam pembiayaan dan pengelolaan. *Trust Building dialogue* dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan antara pemda dan swasta, serta untuk mendapatkan kesepakatan tentang pengelolaan dan bagi hasil. Dalam

---

<sup>64</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Masterplan Kawasan Industri Nikel dsi Provinsi Sulawesi Selatan*, 2014, h. 6-21.

<sup>65</sup> Andi Lukman Agung, ST., *Wawancara*, (Seksi Ind. Logam, Mesin, Elektronika dan Bahan Galian Non Logam di Bidang Perindustrian), tgl 17 September 2018, Pukul 13:30 Wita.

skema ini pemilik modal berlaku sebagai investor dengan sumber dana PMA/PMDN/Bank komersial untuk pembiayaan investasi.

2. *Joint Venture Leases* dan *Concessions*, pemda dan swasta turut andil dalam pembiayaan, tetapi swasta memiliki hak penuh dalam pengelolaan hingga batas waktu yang ditentukan. Pada saat yang telah ditentukan tersebut (umumnya 25-30 th) aset dan pengelolaan akan dikembalikan kepada pemda. Dalam skema ini pemilik modal berlaku sebagai investor dengan sumber dana PMA/PMDN/Bank komersial untuk pembiayaan investasi atau modal usaha.
3. *Concession*, dalam pola pembiayaan ini swasta berperan penuh dalam pembiayaan dengan imbal hasil berupa pengelolaan secara penuh hingga batas waktu yang disepakati. Pada saat periode konsesi habis, aset dan pengelolaan akan dikembalikan kembali kepada pemda. Dalam skema ini pemilik modal berlaku sebagai investor dengan sumber dana PMA/PMDN/Bank komersial untuk pembiayaan kredit investasi.
4. BOT (*Build-Operate-Transfer*), swasta berperan penuh dalam pembiayaan proyek dan pengembangan. Swasta mendapatkan hak penuh pengelolaan hingga batas waktu yang telah disepakati. Aset akan dimiliki bersama antara pemda dan swasta. *Trust Building Dialogue* diperlukan untuk mendapatkan kesepakatan pembagian aset. Dalam skema ini pemilik modal berlaku sebagai investor dengan sumber dana PMA/PMDN/Bank komersial untuk pembiayaan investasi/modal usaha.

5. BOO (*Build-Operate-Own*), pola pembiayaan ini memiliki sifat sama seperti BOT, hanya saja pengelolaan oleh swasta dilakukan selamanya. Sedangkan aset dimiliki bersama antara swasta dan pemda. *Trust Building Dialogue* diperlukan untuk mendapatkan kesepakatan pembagian aset dan imbal hasil yang akan diperoleh mendapatkan kesepakatan pembagian aset dan imbal hasil yang akan diperoleh pemda. Dalam skema ini pemilik modal berlaku sebagai investor dengan sumber dana PMA/PMDN/Bank komersial untuk pembiayaan investasi atau modal usaha.<sup>66</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fatmawaty, ST selaku kepala Bidang Perizinan dan Non perizinan:

*“Dalam pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini, pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Perusahaan Daerah (Perusda) melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam bentuk konsorsium sebagai pengelola Kawasan Industri Bantaeng yang terdiri dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT. Ximax China dan Perusda. Dari empat perusahaan ini membentuk perusahaan PT. Bantaeng Industri Persada (BIP) sebagai pengelola kawasan, dari konsorsium itu Perusda mendapatkan 10% dari nilai investasi”.*<sup>67</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini dikelola oleh perusda yang berasal dari konsorsium empat perusahaan yaitu dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT. Ximax China dan Perusda sebagai perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam kerjasama investasi kawasan industri ini.

---

<sup>66</sup>Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Masterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, 2014, h. 6-23.

<sup>67</sup>Fatmawaty, S.T., *Wawancara*, (Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng), tgl 17 September 2018, Pukul 10:30 Wita.

Menurut Ismail Suny ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1 Tahun 1967 yaitu *joint venture*, *joint enterprise* dan kontrak karya. Dalam hal *joint venture* para pihak tidak membentuk badan hukum yang baru, akan tetapi kerjasama semata-mata bersifat kontraktuil, sedangkan dalam *joint enterprise* terjadi penggabungan modal asing dengan modal nasional ke dalam satu badan hukum Indonesia dan dalam kontrak kerja pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum (nasional) Indonesia yang lain.<sup>68</sup>

#### 1. *Joint Venture*

*Joint venture* merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (*contractual*). Misalnya bentuk kerjasama antara *Van Sickle Associates Inc.*, (suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware, Amerika Serikat) dengan PT. *Kalimantan Plywood Factory* (suatu badan hukum Indonesia) untuk bersama sama mengola kayu di Kalimantan Selatan. Kerjasama ini juga biasa disebut dengan “*Contract of Cooperation*” yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 UU PMA.

#### 2. *Joint Enterprise*

*Joint enterprise* merupakan suatu kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Pasal

---

<sup>68</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.. 61.

3 UU PMA. *Joint Enterprise* merupakan suatu perusahaan terbatas, yang modalnya terdiri dari modal dalam nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing.

### 3. Kontrak Karya

Pengertian kontrak karya (*contract of work*) sebagai suatu bentuk usaha kerjasama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerjasama antara Badan Hukum Milik Negara (BUMN) seperti; Kontrak karya antara PN. Pertamina dengan PT. Caltex International Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat.<sup>69</sup>

## 2. Memberikan Kemudahan Pelayanan dan Perizinan

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang merupakan pengganti dari Undang-undang penanaman modal yang lama, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan perbedaan pengaturan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka dalam UU Penanaman Modal yang berlaku sekarang, masalah penanaman modal asing maupun dalam negeri diatur dalam kesatuan. Perbedaan

---

<sup>69</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, h. 61-64.

penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih dilakukan dalam konteks mengidentifikasi asalnya modal tersebut, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau dari sumber luar negeri atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman modal tersebut, apakah investor lokal/domestik atau investor asing.<sup>70</sup>

Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), inilah yang menjadi daya tarik masuknya beberapa investasi asing di Kabupaten Bantaeng. Sehingga pemerintah memberikan kemudahan dalam berinvestasi di kawasan Industri Bantaeng, ini ditegaskan oleh Ibu Fatmawaty, ST. Selaku Kabid Perizinan dan Non Perizinan dalam wawancara dengan peneliti:

*“Kita sebagai pemerintah Kabupaten Bantaeng selalu Welcom jaki, Selamat datang di kabupaten Bantaeng, tapi dengan membatasi surat izin prinsip selama 6 bulan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa ada investor biasa tidak terealisasi, makanya kami kasih surat izin hanya berlaku 6 bulan, ketika dia serius dia akan datang lagi untuk memperpanjang surat isinnya”<sup>71</sup>*

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa, pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan dalam perizinan tapi disamping itu, pemerintah juga mempertimbangkan investor dengan memberi surat izin dengan waktu 6 bulan, untuk dilihat keseriusannya dalam pembangunan kawasan industri Bantaeng, ketika sampai 6 bulan tidak ada realisasi maka izin pun dicabut, ketika investor serius maka dia akan memperpanjang masa surat izinnya. Senada dengan Bapak Irfan Fajar, S.Sos, selaku Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng adalah:

---

<sup>70</sup>David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, h. 11.

<sup>71</sup>Fatmawaty, S.T., *Wawancara* (Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng), tgl 17 September 2018, Pukul 10:30 Wita.

*“Dalam hal pelayanan perizinan prinsip di sini itu tidak terbelit-belit karena dalam 1 X 24 jam itu harus selesai dalam perizinan sesuai instruksi bapak Nurdin Abdullah, sehingga dalam perizinan penanaman modal asing di kawasan industri Bantaeng itu sangat cepat demi terciptanya iklim investasi yang kondusif serta menjadi daya tarik tersendiri untuk investor masuk di Kabupaten Bantaeng.”<sup>72</sup>*

Wawancara diatas dijelaskan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Bantaeng itu cepat dan transparan dengan 1 X 24 jam proses perizinan harus selesai sesuai dengan instruksi langsung dari Bapak Nurdin Abdullah, demi terciptanya iklim investasi asing yang kondusif dan akan menjadi daya tarik tersendiri investor untuk masuk, karena pelayanan perizinan yang tidak terbelit-belit dalam hal pengurusan perizinan untuk masuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng dalam pembangunan Kawasan Industri Bantaeng.

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.<sup>73</sup>

Percepatan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng telah melakukan kerjasama dengan beberapa investor asing untuk mendukung kawasan industri di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng, investor atau perusahaan yang terlibat dalam pembangunan atau pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng adalah sebagai berikut:

---

<sup>72</sup>Irfan Fajar, S.Sos, *Wawancara* (Kepala Dinas, plt. Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng), tgl 17 September 2018, Pukul 13:30 Wita.

<sup>73</sup> Undang-Undang 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal Asing*, Pasal 26, h.19.

Daftar Investor/Perusahaan di Kawasan Industri Bantaeng

Tahun	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Total Realisasi
2010	PT. Wijaya Lestari	SPBT	34.000.000.000
2013	PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia	Ind. Pem. Logam dasar bukan besi	631,384,590,000
2013	PT. Titan Mineral Utama	Peengolahan Biji Nikel	132,442,975,798
2013	PT. Prima Karya Manunggal	Pengecoran	3,119,980,440
2013	PT. Multi Kilang Pratama	Migas	3,266,000,0000
2014	PT. Bantaeng Indonesia Asia Steel	Ind. Pemb. Logam Dasar Bukan Besi dan baja	714,042,294,000
2014	PT. Tiga Permata Taris	Paving	3000.000.000
2016	PT. Pasifik Agra Energi	Proyek Pembangunan Terminal Penerimaan LNG	-
2016	PT. Energi Nusantara Merah Putih	Pembangkit Listrik Turbin Gas	-
2016	PT. Surgeon Techno	Pembangunan Pelabuhan Laut	-
2016	PT. Sinar Deli Bantaeng	Smelter	151,811,618,000
2016	PT. Inensiunan Mills Indonesia	Pengeringan jagung	12,432,466,000
2017	PT. Intim Perkasa Kilang	Kilang LNG	-

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Bantaeng

UU Nomor 32 Tahun 2004 secara jelas mengatur pembagian kekuasaan atau kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pengadilan, kebijakan keuangan dan fiskal



serta urusan keagamaan. Pasal 13 dan 14 mengatur kewenangan pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota yang mencakup antara lain, perencanaan pembangunan, ketertiban umum dan keamanan masyarakat, infrastruktur lokal, kesehatan, pendidikan, masalah sosial, perubahan, tanah, lingkungan hidup, kependudukan, pelayanan investasi dsbnya. Disamping itu ada juga pengaturan tentang hubungan antara pemerintah daerah dengan aktor-aktor internasional.<sup>74</sup>

Penjelasan diatas bahwa seharusnya ada hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2014, agar terjalin komunikasi yang baik dalam sebuah pembangunan disuatu daerah, dan pusat harus mendukung proses pembangunan suatu daerah demi terciptanya pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatmaty, S.T. Selaku Kabid Perizinan dan Non-Perizinan yang mengatakan bahwa:

*“Tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada investor yang belum terealisasi, kita sebenarnya memberikan sebuah kemudahan izin, tapi salah satu kendala juga di pusat biasa menjadi kendala dalam memberikan sebuah izin, ini yang biasa menjadi kendala tersendiri bagi investor, karena meskipun kita memberikan pelayanan izin yang mudah, tapi dia terkendala lagi di pemerintah pusat, jadi kita berharap antara pusat dan daerah terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam suatu pembangunan.”<sup>75</sup>*

Dari penjelasan diatas bahwa hubungan antara pusat dan daerah menjadi sangat penting mengingat dalam sebuah pembangunan membutuhkan sebuah dukungan dan dorongan kepada pemerintah daerah, demi terciptanya

---

<sup>74</sup>Aleksitus Jemadu, *Politik Global Dalam Teori dan Praktek*, 127-128.

<sup>75</sup>Fatmawaty, S.T., *Wawancara*, (Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng), tgl 17 September 2018, Pukul 10:30 Wita.

pemanfaatan sumber daya alam disuatu daerah yang ingin membangun daerahnya yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan ekonomi yang lainnya.

Keberadaan pembangunan di level lokal, mengisyaratkan bahwa pembangunan tidak didominasi oleh pusat tapi juga di masyarakat bawah. Kenyataan ini menegaskan bahwa realitas politik dalam konteks pembangunan juga ada di level lokal. Realitas politik di level lokal bisa menegaskan beberapa hal. *Pertama*, pembangunan di level lokal masih dipengaruhi oleh elit atau kepentingan pusat. *Kedua*, realitas politik dalam pembangunan di level lokal berdiri otonom dengan kemampuannya secara mandiri dengan tetap menjadi bagian dari pusat kekuasaan. *Ketiga*, realitas politik dalam pembangunan di tingkat lokal dipengaruhi oleh kepentingan luar negara.<sup>76</sup>

### **3. Pembangunan Infrastruktur yang baik**

Pengembangan kawasan industri di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri.<sup>77</sup>

- Pasal 62
  1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya infrastruktur industri;
  2. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri;
  3. Infrastruktur industri paling sedikit meliputi:

---

<sup>76</sup>Warjio, *Politik Pembangunan*, h. 186-187.

<sup>77</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Masterplan Kawasan Industri Nikel di Provinsi Sulawesi Selatan*, 2014, h. 1-4.

- a. Lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri;
  - b. Fasilitas jaringan telekomunikasi;
  - c. Fasilitas jaringan sumber daya air;
  - d. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
  - e. Fasilitas sanitasi; dan
  - f. Fasilitas jaringan transportasi,
4. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan melalui:
- a. Pengadaan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Pola kerjasama antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau
  - c. Pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.<sup>78</sup>

Ketersediaan infratraktur fisik yang memadai secara kuantitas (tersedia) dan kualitasnya (dalam kondisi baik) akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya, hal tersebut dikarenakan akan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan investor, seperti kemudahan dalam distribusi, bahan produksi maupun hasil produksinya dari daerah dan ke daerah lainnya maupun kegiatan impor/ekspor barang. Dengan demikian akan dapat menghemat biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh investor.

---

<sup>78</sup>Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Masterplan Kawasan Industri Nikel di Provinsi Sulawesi Selatan*, 2014, h. 1-4.

Adapun wawancara oleh bapak Irfan Fajar, S.Sos. Selaku Plt. Kepala Dinas

Perindustrian Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng:

*“Kami melalui pemerintah Kecamatan Pa’jukukang yang masuk dalam peruntukan pembangunan kawasan industri besar, berperan dengan memfasilitasi kebutuhan investor asing dengan membangun infrastruktur yang lebih baik, karena infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Ketersediaan infrastruktur yang merujuk pada infrastruktur teknis atau fisik seperti fasilitas Jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, pelabuhan dan pembebasan lahan. Agar investor tertarik masuk di Kabupaten Bantaeng dalam pembangunan Kawasan Industri Bantaeng.”<sup>79</sup>*

Adapun hasil wawancara dengan Abdul Rasyid Selaku Kabag Pembangunan dan Ekonomi di Kantor Camat Pa’jukukang adalah:

*“Kami selaku pemerintah Kecamatan Pa’jukukang sangat mendukung suatu pembangunan disini karena akan menjadi keuntungan juga dimasyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kedepannya. Karena dilihat lahan yang dipakai juga adalah lahan yang sudah tidak produktif yang jauh dari pemukiman warga”.<sup>80</sup>*

Hasil wawancara diatas, bahwa pemerintah harus memenuhi beberapa kebutuhan investor dalam upaya peningkatan investasi asing di Kawasan industri Bantaeng seperti dalam pembebasan lahan, ketersediaan listrik, infrastruktur jalan, dan pelayanan yang baik, karena akan menjadi daya tarik tersendiri untuk investor untuk masuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng dalam pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Karena infrastruktur merupakan hal yang vital untuk mempercepat pembangunan suatu daerah, dengan penyediaan lahan bagi investor untuk mendirikan sebuah pembangunan, maka hal yang tidak dapat dipisahkan dari lahan tersebut agar dapat dijadikan sebagai lokasi industri yang dapat memenuhi kebutuhan investor adalah adanya

---

<sup>79</sup>Irfan Fajar, S.Sos, *Wawancara*, (Kepala Dinas, plt. Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng), tgl 17 September 2018, Pukul 13:30 Wita.

<sup>80</sup>Abdul Rashid, *Wawancara*, (Kasi Pembangunan dan Ekonomi di Kantor Camat Pa’jukukang) tgl, 10 September 2018. Pukul 09:30 Wita.

kelengkapan sarana dan prasarana (Infrastruktur fisik). Infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi tersebut meliputi infrastruktur dalam arti sempit maupun dalam artian untuk umum. Infrastruktur dalam artian sempit adalah infrastruktur yang diperlukan investor di lingkungan dimana investor membangun usahanya atau perusahaannya seperti jaringan jalan lingkungan, saluran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi listrik, saluran pengumpulan air limbah industri, instalasi pengolahan air limbah, penerangan jalan dan lainnya. Sedangkan infrastruktur dalam artian umum adalah infrastruktur yang ada di suatu daerah yang meliputi jalan raya, jalan bebas hambatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan air bersih, telekomunikasi dan lainnya.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.<sup>81</sup>

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu daerah.

---

<sup>81</sup>Kodoatie R.J, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 102.

#### 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu karakteristik menonjol dari negara-negara yang perekonomiannya maju dan berhasil menarik investasi secara signifikan adalah negara-negara yang memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan sumber daya manusia. Melihat Singapura, Malaysia, Cina, India, Jepang, dan lain-lain, mereka bahkan secara sadar menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan negaranya, sehingga sumber daya manusia sebagai asset produktif bukan beban bagi negara.<sup>82</sup>

Kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global, kemampuan penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas, serta daya tarik Indonesia bagi kalangan investor, dibentuk melalui sumber daya manusia. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dalam standar pendidikan dengan negara tetangga. Bahkan, survei yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di negara-negara asia tahun 2003 mengungkapkan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tak memadainya pasokan keahlian manajemen di Indonesia, menyebabkan rendahnya minat investor terhadap Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Indonesia ketika pesaing regional terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan mereka.<sup>83</sup>

Dengan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng ini nantinya akan berdampak bagi masyarakat di sekitar Kawasan Industri Bantaeng, tentunya dalam hal dinamika ketenagakerjaan atau tenaga kerja siap pakai, maka tentu

---

<sup>82</sup>Effendi Siradjuddin, *Memerangi Sindrom Negara Gagal*, h. 296.

<sup>83</sup>Effendi Siradjuddin, *Memerangi Sindrom Negara Gagal*, h. 426.

saja bakalan erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bantaeng, karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat dari segi pendidikan masih rendah dalam hal industri, sehingga peran pemerintah hendaknya mengembangkan atau menyediakan wadah untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam hal ketenagakerjaan akan menjadi masalah bagi masyarakat lokal, mengingat perusahaan yang masuk adalah perusahaan industri yang baru di Kabupaten Bantaeng yang notabeneanya belum dipahami oleh masyarakat, dan masyarakat tidak di imbangi dengan pendidikan dan *skill* maupun yang *unskill*, sehingga akan menjadi masalah yang sangat besar dalam hal ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng, dan ini akan membuat masyarakat tidak mampu bersaing di dalam sebuah pembangunan daerah, dan akan memakai tenaga kerja asing ataupun diluar Kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantaeng bertanggung jawab untuk menciptakan putra putri Bantaeng yang berpendidikan yang memiliki keterampilan, keahlian, dan menguasai Teknologi, sebagai tenaga kerja siap pakai yang merupakan faktor pendukung dalam pembangunan Kawasan Industri Bantaeng.

Adapun wawancara peneliti dengan Kabag Perindustrian (Ibu Iffah Rafidah Djaffar, ST) adalah Sebagai berikut:

*“SDM memang masih rendah, sehingga dari tahun 2015 kita selalu mengadakan pelatihan tekhnikal dan mekanikal untuk anak-anak Bantaeng kurang lebih 200 orang kita kirim di Makassar dengan 100 tekhnikal dan 100 mekanikal, dan tahun 2016 putra putri Bantaeng 60 orang kami latih di Bandung khusus untuk operator smelter dan 2018 kami latih kurang lebih 30 orang langsung ke konawe selatan yang*



*industri nya sama dengan industri kita khusus Purnise, untuk disalurkan masuk perusahaan langsung.*<sup>84</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam pengetahuan tentang perindustrian dan lain-lain, karena dengan adanya kawasan industri akan membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang menjadi sangat penting dalam sebuah pembangunan, dan pemerintah Kabupaten Bantaeng selalu mengirim putra putri Bantaeng untuk mengembangkan sumber daya manusia agar masyarakat Kabupaten Bantaeng bisa terserap dalam sebuah perusahaan yang ada di kawasan industri Bantaeng dan perusahaan atau investor akan tertarik juga ketika sumber daya manusia itu ada sebagai penunjang pembangunan. Selain itu, pemerintah telah membangun sebuah sekolah di Kecamatan Pa'jukukang yaitu AKOM dan sebelum itu sudah ada BLK, sebagai wadah untuk pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja dalam industri di Bantaeng.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Irfan Fajar, S.Sos. Selaku Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan ketenagakerjaan dalam wawancara:

*“Salah satu peran pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah telah mendirikan Sekolah sebagai penunjang sebuah pembangunan di Kawasan Indusri Bantaeng, yaitu AKOM, (Akademi Komunitas Industri Manufaktur Negeri Bantaeng), dimana selama 5 periode akan di gratiskan oleh pemerintah, disana di didik selama dua tahun, setelah selesai akan di salurkan langsung ke Perusahaan sesuai dengan skillnya, dengan adanya AKOM ini menjadi jalan keluar bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam mengetahui Industri yang ada di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), dan yang di proritaskan itu*

---

<sup>84</sup>Iffah Rafidah Djaffar, ST, Wawancara, tgl 12 September 2018, Pukul 10:00 Wita.



*adalah orang Bantaeng, dan sebelum ada AKOM sudah ada BLK (Balai Latihan Kerja), sebagai pekerja lepas, wadah ini untuk mengembangkan sebuah potensi-potensi misalnya, Kursus Bengkel, cara mengolah hasil pertanian Dan lain-lain, inilah upaya pemerintah sebagai bentuk bagaimana masyarakat bisa mengembangkan sebuah Skillnya baik dalam perihal Industri yang ada di Kabupaten Bantaeng.*<sup>85</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng telah mendirikan sebuah wadah atau pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan tentang sebuah industri sebagai penunjang sebuah pembangunan di kawasan industri Bantaeng, yaitu Akademi Komunitas Industri Manufaktur Negeri Bantaeng (AKOM), yang dimana selama lima periode akan di gratiskan oleh pemerintah, dengan di didik selama dua tahun, yang dengan adanya AKOM ini menjadi jalan keluar bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng sebagai tenaga kerja siap pakai dalam kawasan industri dengan prioritas adalah masyarakat Kabupaten Bantaeng. Selain AKOM ini sudah ada Balai Latihan Kerja (BLK), sebagai pengembangan sumber daya manusia, wadah ini untuk belajar atau mengembangkan sebuah potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat, misalnya kursus perbengkelan, kursus menjahit dan tentang cara mengelola hasil pertanian, dan lain-lain.

### **C. Dampak Keberadaan Kawasan Industri Bantaeng Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pa'jukukang.**

Keberadaan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan industri. Dampak yang dirasakan oleh

---

<sup>85</sup>Irfan Fajar, S.Sos., Wawancara, Tgl 17 September 2018, Pukul 13:30 Wita.

setiap masyarakat akan berbeda, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sehingga peran pemerintah hendaknya mampu menjadi pengendali dari sebuah pembangunan tersebut agar dampak positif mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga kelapisan sektor ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dampak ekonomi dan dampak sosial terhadap keberadaan kawasan industri Bantaeng adalah sebagai berikut:

### **1. Dampak Ekonomi**

Ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya-sumber daya yang langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya”.<sup>86</sup>

Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian industri yang pada umumnya di mengerti orang. Dalam pengertian umum industri pada hakikatnya berarti perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Kegiatan seperti itu antara lain ialah pabrik tekstil, pabrik perakit atau pembuat mobil, dan pabrik pembuat minuman ringan. Dalam teori ekonomi istilah industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam satu pasar. Sebagai contoh, kalau dikatakan industri mobil maka yang dimaksudkan adalah sebagai perusahaan mobil yang ada dalam pasar yang sedang dianalisis, sedangkan kalau dikatakan

---

<sup>86</sup> Prathama Rahardja,,*Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 3.

industri beras maka yang dimaksudkan adalah seluruh produsen beras yang ada dalam pasar.<sup>87</sup>

Pada dasarnya manusia sudah terkonsep nilai ekonomi sebagai makhluk sosial sejak lahir. Sandang, pangan dan papan sudah merupakan sesuatu hal yang perlu dipenuhi bahkan sebelum kita lahir maka industri tertuntut untuk memenuhi pemenuhan sandang, pangan dan papan sejak lahir, maka perubahan-perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh keberadaan industri di kawasan industri Bantaeng bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perekonomian suatu wilayah tergantung pada potensi dan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki, berbagai kebijakan di tempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng.<sup>88</sup> Khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan pembangunan kawasan industri Bantaeng yang selama ini belum tersentuh oleh pembangunan, berbicara tentang ekonomi maka erat kaitannya dengan semua aktivitas perekonomian manusia guna menunjang kebutuhan hidup sehari-hari untuk kesejahteraan masyarakat.

Setelah berdirinya perusahaan tentunya dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar kawasan industri Bantaeng khususnya di Kecamatan Pa'jukukang yang dimana masyarakat yang hanya bermata

---

<sup>87</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 194.

<sup>88</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Masterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, 2014, h. 4-11.

pencarian sebagai nelayan, peternak dan petani kini bisa beralih profesi sebagai karyawan swasta. Karena keadaan petani sangat ditentukan oleh keadaan cuaca, karena ketika musim kemarau melanda, maka lahan akan kekeringan, dan tumbuhan pun banyak yang mati terutama untuk petani dan sehingga masyarakat banyak yang menganggur bahkan banyak yang keluar negeri mencari rezeki.

Adapun wawancara dengan Abdul Rasyid selaku Kasi Pembangunan dan Ekonomi di Kantor Kecamatan Pa'jukukang adalah:

*“Dengan kebanyakan masyarakat Pa'jukukang dengan pekerjaan bertani, beternak dan bersawah, nelayan, petani rumput laut, masyarakat Pa'jukukang bisa dikatakan sebagai masyarakat yang bergantung pada air hujan, karena Kecamatan Pa'jukukang merupakan salah satu daerah yang susah air ketika musim kemarau datang, sehingga membuat masyarakat banyak yang menganggur dan banyak pula yang keluar negeri untuk menafkahi keluarganya.”<sup>89</sup>*

Menurut hasil wawancara tersebut bahwa keadaan penduduk di Kecamatan Pa'jukukang yang paling kebanyakan bertani, bersawah, dan lain-lain sebagai sumber penghasilannya, sangat ditentukan oleh keadaan cuaca, karena ketika musim kemarau melanda, maka lahan akan kekeringan, dan tumbuhan pun banyak yang mati terutama untuk petani sehingga masyarakat banyak yang menganggur bahkan banyak yang keluar negeri mencari rezeki.

Sesuai wawancara peneliti dengan ibu Iffah Rafidah (selaku kepala bagian perindustrian di Kabupaten Bantaeng yang mengatakan:

*”Dengan hadirnya kawasan industri Bantaeng, akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar dengan terbukanya peluang masuk kerja. Karena dimana sebelum adanya kawasan industri masyarakat hanya bergantung pada hasil pertanian, yang semakin tahun semakin berkurang lahan pertanian, karena diakibatkan pertumbuhan penduduk yang meningkat dan masyarakat juga banyak keluar di negara tetangga mencari*

---

<sup>89</sup>Abdul Rasyid, *Wawancara*, (Kasi Pembangunan dan ekonomi di Kantor Kecamatan Pa'jukukang), tgl 10 September 2018, Pukul 09:30 Wita.

*pekerjaan. Sehingga dengan hadirnya kawasan industri masyarakat sekitar bisa tersalurkan masuk kerja atau membuka peluang usaha di sekitar kawasan industri Bantaeng tanpa harus keluar negara mencari kerja.”<sup>90</sup>*

Wawancara diatas di jelaskan bahwa dengan adanya Kawasan Industri Bantaeng ini diharapkan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat sekitar, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah, dan disamping itu masyarakat sekitar Kawasan Industri Bantaeng dapat membuka peluang usaha sebagai penunjang dari kebutuhan pekerja yang ada di Kawasan Industri Bantaeng, ini senada yang dikatakan oleh bapak Andi Lukman Agung, ST. selaku kepala seksi di Bidang Perindustrian dalam wawancara:

*“Kawasan industri ujung-ujungnya untuk mensejahterahkan masyarakat, dan menambah Perkapita kabupaten Bantaeng, dengan munculnya Kawasan industri pasti akan membutuhkan tenaga kerja, makanya kami dirikan pusat-pusat pemberdayaan manusia seperti BLK dan AKOM, sehingga tenaga asing bisa dimanilisir yang masuk dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia yang kita miliki, dan kita juga tidak boleh bahwa harus orang Bantaeng semua, karena penduduk Bantaeng itu cuma berapa, jadi kita harus mengambil dari luar juga karena Kabupaten Bantaeng penduduknya itu sedikit, belum lagi yang jadi guru, PNS, dan lain-lain, jadi kita membuka juga peluang untuk kabupaten tetangga untuk masuk kerja di Kawasan Industri Bantaeng, tapi menfokuskan untuk masyarakat yang ingin bekerja di Kabupaten Bantaeng, selain efek dari tenaga kerja, pasti akan berdampak juga ke penduduk sekitar disana, misalnya, untuk mensupport kebutuhan makan minumannya tenaga kerja, warung, kos-kosan, dan lain-lain yang menunjang kebutuhan pekerja disana, dan ini juga akan mengdongkrak perekonomian daerah misalnya pajak jalan, dan listrik dan lain-lain yang kita bebankan kepihak perusahaan itu akan masuk dalam pendapatan daerah Bantaeng.”<sup>91</sup>*

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari adanya kawasan industri Bantaeng yaitu membuka peluang tenaga kerja bagi masyarakat

---

<sup>90</sup> Iffah Rafidah Djaffar, ST, Wawancara, tgl 12 September 2018, Pukul 10:00 Wita.

<sup>91</sup> Andi Lukman Agung, ST., Wawancara, tgl 12 September 2018, Pukul 10:00 Wita.

Kabupaten Bantaeng dengan mengadakan sebuah pemberdayaan manusia seperti BLK dan AKOM untuk terserap masuk di perusahaan kawasan industri langsung dengan menggratiskan kuliahnya selama lima periode agar masyarakat di Kabupaten Bantaeng di proriataskan langsung tersalurkan masuk ke perusahaan dan inilah bentuk agar bagaimana masyarakat Kabupaten Bantaeng bisa bersaing dengan tenaga asing, dan bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar, misalnya, warung, kos-kosan, tempat laundry, dan dampak Kawasan Industri Bantaeng ini bisa juga menambah pendapatan Bantaeng, selain dari pertanian yang semakin berkurang.

Adapun kelayakan sosial ekonomi dalam analisis kawasan industri adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Langsung

Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Keberadaan industri besar, sedang dan kecil yang akan di bangun di Kawasan Industri Bantaeng akan menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga *skill* dan *unskill*. Peluang lapangan kerja tersebut diantaranya adalah pegawai pabrik baik buruh maupun tenaga ahli atau manajer di berbagai jenis industri. Di samping pekerja pabrik, lapangan kerja baru lainnya adalah petugas kebersihan, keamanan, listrik, telepon, pengelola kebun/RTH, pekerja konstruksi saat pembangunan, rumah makan, kesehatan, tenaga kerja di kantor pengelola kawasan dsb. Hasil studi di kawasan industri lainnya, diperkirakan tenaga kerja per Ha nya

adalah sekitar 100 orang dengan demikian kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Bantaeng yang memiliki luas lahan sekitar 3.055 Ha dibutuhkan 305.500 orang.

b. Peningkatan Pendapatan Daerah

Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng secara langsung akan memberikan manfaat terhadap meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi semua kegiatan yang ada di kawasan industri Bantaeng seperti pendapatan dari izin pendirian bangunan, pendapatan sewa bangunan/kapling industri, pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan, retribusi parkir, penghasilan dari penggunaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah, listrik dan telepon, pajak reklame dan sebagainya. Peningkatan pendapatan lainnya adalah dari pendapatan yang diperoleh peningkatan kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan dan kegiatan lainnya yang menjadi pemasok kegiatan industri. Berkembangnya kegiatan industri akan mendorong berkembangnya sektor-sektor lainnya dan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Kegiatan industri juga akan berdampak terhadap alih teknologi dan mendorong perubahan struktur ekonomi daerah dari sektor primer ke sektor tersier dan sekunder.

c. Manfaat Tidak Langsung

Kegiatan Kawasan Industri Bantaeng akan berdampak tidak langsung terhadap peningkatan usaha di sektor perhubungan, konstruksi dan jasa di sekitar kawasan industri umumnya bersifat *propulsive* yakni mampu



menggerakkan daerah *hinterlandnya*. Karena kegiatan industri membutuhkan bahan baku yang dapat diperoleh dari kawasan disekitarnya.<sup>92</sup>

## 2. Dampak Sosial

Dampak sosial adalah konsekuensi sosial yang timbul akibat suatu kegiatan pembangunan, maupun penerapan suatu kebijaksanaan dan program. Di Indonesia studi dampak sosial pada umumnya menjadi bagian dari studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya diterapkan untuk proyek pembangunan. Dampak sosial muncul ketika aktivitas proyek, program atau kebijaksanaan diterapkan pada suatu masyarakat. Pengaruh itu bisa positif, bisa pula negatif. Hal ini hanya dapat diuji dari nilai, norma, aspirasi, dan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pembangunan.<sup>93</sup>

Perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat ini menurut Armour meliputi aspek-aspek:

1. Cara hidup (*way of life*), termasuk di dalamnya bagaimana manusia dan masyarakat itu hidup, bekerja, bermain, dan berinteraksi satu dengan yang lain. Cara hidup ini disebut sebagai aktivitas keseharian;
2. Budaya, termasuk di dalamnya sistem nilai, norma, dan kepercayaan;

---

<sup>92</sup>Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Masterplan Kawasan Industri Nikel Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, 2004, h. 4-2.

<sup>93</sup>Sudharto P. Hadi, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*, (Semarang: UGM, 1995),h. 110.



3. Komunitas, meliputi struktur penduduk, kohesi sosial, stabilitas masyarakat, estetika, sarana-prasarana yang diakui sebagai “*public facilities*”. Beberapa contoh “*public facilities*” adalah gedung sekolah, tempat ibadah, seperti musholla dan gereja, balai rukun warga, balai kelurahan. Seringkali kehadiran proyek yang menimbulkan dampak perpindahan penduduk menimbulkan renggangnya kohesi sosial. Mereka harus pindah ke tempat lain yang tidak selalu sama dengan tetangga sebelumnya. Proyek-proyek baru juga seringkali harus menggeser fasilitas umum seperti tempat ibadah (masjid, gereja, musholla), balai desa, kuburan, dan sekolah.<sup>94</sup>

Dampak pada aspek sosial masyarakat, seperti halnya dalam penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, dapat memberikan peluang berusaha bagi masyarakat, sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) juga berpengaruh terhadap aspek lingkungan, seperti lingkungan menjadi tidak bersih dan udara tercemar, udara menjadi tidak sehat sehingga memicu terganggunya masyarakat akan keberadaan perusahaan swasta karena berpengaruh negatif terhadap para petani dan nelayan dan petani rumput laut yang berada disekitar industri.

Adapun wawancara dari Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam wawancara dengan mengatakan:

*“Dampak dari keberadaan kawasan industri pasti akan dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk petani rumput laut karena pasti akan*

---

<sup>94</sup>Sudharto P. Hadi, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*, h. 24-25.

*terpengaruh oleh Kapal yang keluar masuk dipelabuhan yang membawa sebuah bahan baku, karena rumput laut mengapung diatas permukaan sehingga kapal yang keluar masuk akan mengganggu apalagi pasti ada keluar solar, tapi kita selaku pemerintah selalu melakukan dan mengusahakan agar itu cepat ditangani agar dampak itu bisa teratasi”<sup>95</sup>*

Senada dengan Sekretaris Camat Pa’jukukang yang mengatakan bahwa:

*“ Dampak dari keberadaan kawasan industri sangat berefek bagi para petani yang berada di sekitar Kawasan Industri Bantaeng, misal, Petani Rumput Laut, Maupun para petani lahan, karena sudah banyak masyarakat yang mengeluh kepada kami bahwa kami mengalami efek pada pertumbuhan padi maupun jagung kami sejak adanya Kawasan Industri Bantaeng”<sup>96</sup>*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dampak dari keberadaan Kawasan Industri Bantaeng ini, berdampak negatif bagi masyarakat petani rumput laut, dan para petani yang ada disekitar kawasan indutri Bantaeng, ini karena banyaknya keluhan masyarakat kepada pemerintah setempat, jadi, pemerintah dan pihak perusahaan harus bisa menangani masalah ini, mengingat masyarakat yang ada di sekitar kawasan industri rata-rata menjadikan pertanian sebagai lahan mata pencaharian, dan sebagiannya lagi menjadikan pendapatan tambahan. Sehingga limbah perusahaan dan lain-lain yang menimbulkan masalah kepada masyarakat pemerintah harus mencari sebuah solusi agar tidak terjadi sebuah masalah bagi masyarakat petani yang ada di sekitar Kawasan Industri Bantaeng. Adapun wawancara peneliti dengan Bapak Asrul selaku tokoh masyarakat di Desa Papanloe di Kecamatan Pa’jukukang adalah:

*“Beralihnya lahan pertanian menjadi lahan industri sangat berdampak bagi masyarakat disini, dari sisi positifnya adanya pembangunan disini perubahan mata pencaharian masyarakat yang pada awalnya hidup dengan bercocok tanam ataupun sebagai nelayan kini telah berubah menjadi pekerjapada perusahaan yang berada disini seperti jadi*

---

<sup>95</sup>Irfan Fajar, S.Sos.,*Wawancara*,Tgl 17 September 2018, Pukul 13:30 Wita.

<sup>96</sup>ST. Yuliati, SE.,*Wawancara*, (Sekretaris Kecamatan Pa’jukukang Di Kantor Camat Pa’jukukang) ,Tgl 10 September 2018, Pukul 08:30 Wita.

*keamanan, tukang bersih-bersih, jadi staff, dan jadi buruh didalam. Tidak hanya berhenti disitu dengan hadirnya perusahaan-perusahaan terkhususnya di Kecamatan Pa'jukukang dengan terbukanya peluang usaha masyarakat sekitar seperti membuka bengkel maupun usaha kecil - kecilan berupa warung - warung bahkan menyewakan tempat penginapan untuk menampung masyarakat dari luar daerah yang telah mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang ada di sini. Tapi dampak negatifnya dengan hadirnya kawasan industri sangat berefek bagi para petani karena dilihat hasil pertanian sekarang itu menurun semenjak masuknya industri, dan bahkan mengakibatkan tanaman mati, sehingga masyarakat banyak yang mengeluh karena faktornya udara menjadi tidak sehat, lingkungan pasti tercemar sehingga pemerintah harus mencari solusi agar tidak terlalu berdampak negatif kepada masyarakat sebagian. Karena tidak semua juga masuk diterima di perusahaan, dan pertanian juga sudah menjadi mata pencaharian disini begitupun para petani rumput laut kesian karena banyak yang rusak mungkin pengaruh kapal yang sudah keluar masuk di pelabuhan dan sempat juga itu limbah perusahaan itu turun kelaut sehingga rumput laut itu menjadi rusak.”<sup>97</sup>.*

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Bantaeng sangat berdampak bagi masyarakat sekitar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sisi positifnya dimana masyarakat yang dulunya hanya bertani dan seorang nelayan bisa beralih profesi menjadi pekerja dengan tersalurkan masuk di perusahaan yang ada, dan adanya kawasan industri Bantaeng dengan terbukanya peluang usaha di sekitar perusahaan, seperti warung, bengkel, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi negatifnya sangat berefek bagi para petani dan petani rumput laut yang mengakibatkan hasil pertanian menurun setelah hadirnya kawasan industri dan banyak tanaman tidak tumbuh atau mati, dan petani rumput laut juga hasilnya banyak yang rusak yang diakibatkan faktor kapal yang keluar masuk, dan lingkungan yang sudah tercemar akibat hadirnya kawasan industri Bantaeng.

---

<sup>97</sup>Asrul, Wawancara, (Tokoh Masyarakat di Desa Papanloe Kecamatan Pa'jukukang ), tgl 25 Januari 2019, pukul 19:30 Wita.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam peningkatan investasi asing di sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam peningkatan investasi asing di sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yaitu: 1) Kebijakan dengan membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi investor asing, 2) Pelayanan perizinan yang mudah dengan prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit dengan komitmen 1 x 24 jam proses perizinan harus selesai, 3) Pembangunan infrastruktur yang baik sebagai penunjang pembangunan kawasan industri, 4) Pengembangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja siap pakai dengan fasilitas pendidikan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Negeri Bantaeng (AKOM) dan Balai Latihan Kerja (BLK).
2. Dampak keberadaan Kawasan Industri Bantaeng terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari dampak ekonomi dan dampak sosial yang *pertama*, Dampak ekonomi dengan hadirnya kawasan industri Bantaeng, dimana masyarakat sekitar industri berpeluang masuk kerja dengan terbukanya lapangan pekerjaan, dan terbukanya peluang usaha di sekitar kawasan industri Bantaeng. *Kedua*, dampak sosial hadirnya kawasan industri dengan bergesernya lahan pertanian ke lahan industri, terdapat beberapa perubahan bagi masyarakat sekitar yang dimana sebelum adanya kawasan industri masyarakat hanya bermata pencaharian sebagai petani,

nelayan, dan petani rumput laut bergeser jadi pekerja di dalam perusahaan, dan banyaknya usaha baru terbuka di sekitar kawasan industri, tapi di sisi lain dampaknya terhadap lingkungan sangat dirasakan oleh para petani yang hasil pertaniannya mengalami penurunan bahkan tidak tumbuh dan begitupun petani rumput laut dengan rusaknya hasil rumput lautnya di akibatkan kegiatan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan implikasi dari hasil penelitian, antara lain:

1. Lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menarik investasi asing di Indonesia demi tercapainya pembangunan ekonomi nasional maupun daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan pembuatan perda dan kemudahan penanaman modal baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri guna meningkatkan investasi penanaman modal secara kondusif, efisien, memberikan kepastian hukum, dan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah.
2. Pemerintah daerah dalam mengembangkan Kawasan Industri tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi tetapi hendaknya mengedepankan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar kawasan industri demi terwujudnya kesejahteraan bersama, khususnya masyarakat petani dan nelayan yang bermukim di sekitar kawasan industri.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Budiarjo, Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.

Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPI Press, 2007.

Hajar, Ibnu, *Teori Dan Praktek Komunikasi Politik*, Yogyakarta : GENTA Press 2015.

Harjino, Dhaniswara K, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Hadi, Sudharto P, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*, Semarang: UGM, 1995.

Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada media, 2004.

Ismail Abu, Muhammad Ibn, *Abdullah Al-Bukhari Al-Ju'fi, Aljami' Al-musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Mij Umar Rasulullah Wa Sunnanih Wa Ayyamih Juz 111*, Cet: Idar Tauq Al-Najah 1422 H.

Jemadu, Aleksitus, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Jhingan, M.L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Masterplan Kawasan Industri Nikel di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, 2014.

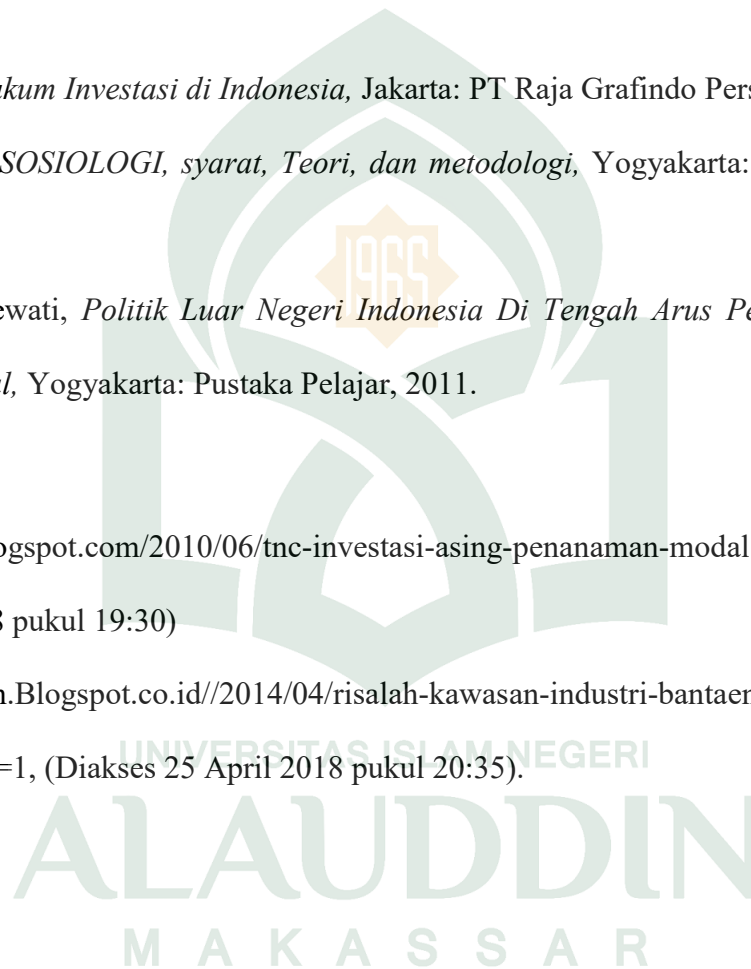
Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga 2009.

- Lukman H, Arif, *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1986-2011*, Skripsi, Surakarta: Fak. Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012.
- Munarmi, *Peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013*, Skripsi, Tanjung Pinang: Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja AliHaji Tanjungpinang, 2015.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Munir, Muhammad Misbakhul, *Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah*, Skripsi, Semarang: Fak. Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Pratiknya, *Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Semarang*, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenegoro Semarang, 2007.
- Warjio, *Politik Pembangunan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rahmat, Anugrah, *Analisis kebijakan Penanaman Modal Asing Di Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, Makassar: Fak. Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin, 2015.
- Rodee, Clymer, Carlton, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rahardja, Prathama, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- RJ, Kodoatie, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Lajnah pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2007.
- Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tantang Penanaman Modal Asing.
- Sirajuddin, Effendi, *Memerangi Sindrom Negara Gagal*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2009.



- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sukimo, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sihab, M. Quraish, *Tafsir Al-misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sutrisno, Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Usman, Sunyoto, *SOSIOLOGI, syarat, Teori, dan metodologi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.
- Wuryandari, Ganewati, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Internet:**
- Ahyarsuhendar.blogspot.com/2010/06/tnc-investasi-asing-penanaman-modal.html (Diakses 03 Juni 2018 pukul 19:30)
- <http://belukarhujan.Blogspot.co.id//2014/04/risalah-kawasan-industri-bantaengkiba.html/m=1>, (Diakses 25 April 2018 pukul 20:35).





**L**

**A**

**M**

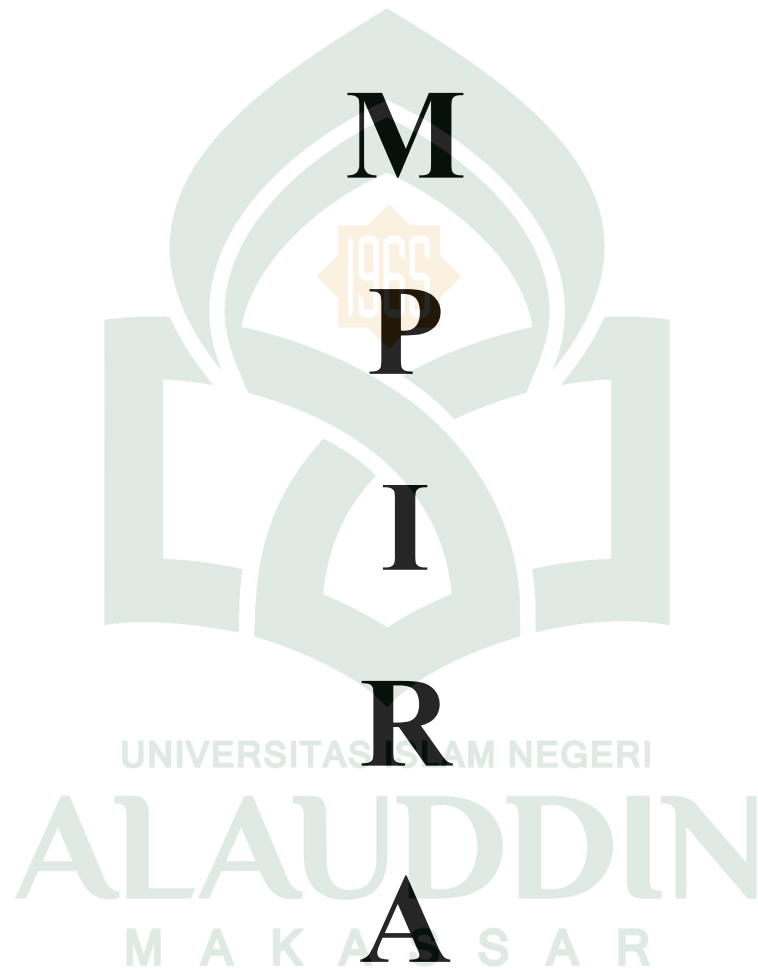
**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



1. Foto dengan Ibu Iffah Rafidah Djaffar, ST (Kepala Bidang Perindustrian Di Kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng), dan Bapak Andi Lukman Agung, ST (Kepala Seksi Ind. Logam, Mesin, Elektronika dan Bahan Galian Non Logam di Bidang Perindustrian).



2. Foto Bapak Irfan Fajar, S.Sos (Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng) dan Andi Lukman Agung, ST.



3. Foto Dengan Ibu Fatmawaty, ST (Kepala bidang Perizinan dan Non-Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng).



4. Foto Dengan Bapak Asrul (Selaku Tokoh Masyarakat di Desa PapanLoe di Kecamatan Pa''jukukang.



5. Foto dengan salah satu perusahaan di Kecamatan Pa'jukukang (PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia).



6. Foto Bersama Dengan Bapak Abdul Raasyid (Kasi Pembangunan dan Ekonomi Di Kantor Camat Pa'jukukang, Tanggal 10 September 2018.



**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 25 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.



5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- 1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. Kepastian hukum;
  - b. Keterbukaan;
  - c. Akuntabilitas;
  - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. Kebersamaan;
  - f. Efisiensi berkeadilan;
  - g. Berkelanjutan;
  - h. Berwawasan lingkungan;
  - i. Kemandirian; dan
  - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 4**

- 1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
  - a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
  - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
- 2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
  - a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;



- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- 3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

#### **BAB IV**

### **BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 5**

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
  - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. Membeli saham; dan
  - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 10**

- 1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- 2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENANAM MODAL**

**Pasal 14**

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan

- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

### **Pasal 16**

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

## **BAB X**

### **FASILITAS PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 18**

- 1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- 2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
  - a. Melakukan peluasan usaha; atau
  - b. Melakukan penanaman modal baru.
- 3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
  - a. Menyerap banyak tenaga kerja;
  - b. Termasuk skala prioritas tinggi;
  - c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
  - d. Melakukan alih teknologi;
  - e. Melakukan industri pionir;
  - f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
  - g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
  - j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- 4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
- a. Pajak Menghasilkan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
  - b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
  - d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  - e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
  - f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- 5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas,

memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

- 6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **Pasal 21**

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. Hak atas tanah;
- b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. Fasilitas perizinan impor.

#### **Pasal 22**

- 1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus

selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
  - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- 2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
- a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
  - b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
  - c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
  - d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
  - e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

- 3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- 4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

### **Pasal 23**

- 1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
  - a. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
  - b. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
  - c. Calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.
- 2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:

- a. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
- b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
- d. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
- e. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

## **Pasal 26**

- 1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- 2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB XII**

### **KOORDINASI DAN PELAKSANAAN**

### **KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

## **Pasal 28**

- 1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
  - b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;

- c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
  - d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  - e. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
  - f. Mempromosikan penanaman modal;
  - g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  - h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
  - i. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
  - j. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN**  
**PENANAMAN MODAL**

**Pasal 30**

- 1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- 2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- 4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- 5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- 6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- 7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
  - a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

- b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
  - c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
  - d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
  - e. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
  - f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- 8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota
- 9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Samata--Gowa ■ (0411) 841879 Fax 8221400

Nomor : B – 139/FUF/PP.00.9/08/2018

Samata Gowa, 13 Agustus 2018

Lamp : --

Hal : Rekomendasi

Kepada

Yth : Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Pro. Sulawesi Selatan  
di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat disampaikan, bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Ilham  
N I M : 30600113040  
Tingkat/Smt. : Strata Satu (S.1) / X (Sepuluh)  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin, Filsafat & Politik / Ilmu Politik  
A l a m a t : Perumahan Samata Indah

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul :  
"Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng Dalam Peningkatan Investasi Asing  
di Sektor Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)"

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1).

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Ismah Tita Ruslin.,S.IP.,M.Si  
2. Muh Ridha, S.Hi.,MA

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di Kab Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam

Dekan,

Kuasa Nomor : B- 297/FUF/Kp.07.6/7/2018

Tanggal 27 Juli 2018

Dr. Tasmin, M.Ag  
NIP. 19640815 199303 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.





1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 5 1 0 5

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5077/S.01/PTSP/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Bupati Bantaeng

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Nomor : B-139/FUF/PP.00.9/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ILHAM  
Nomor Pokok : 30600113040  
Program Studi : Ilmu Politik  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PERAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTAENG DALAM PENINGKATAN INVESTASI ASING DI SEKTOR KAWASAN INDUSTRI BANTAENG (KIBA) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Agustus s/d 13 Oktober 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 15 Agustus 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 15-08-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2tbkpmduiselprov.go.id> Email : [p2t\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p2t_provsulsel@yahoo.com)  
Makassar 90222







# PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. Andi Mannapliang, email : kptspbantaeng@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

## IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/313/IPL/DPM-PTSP/IX/2018

### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

### MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ILHAM  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
N I M : 30600113040  
No. KTP : 7303053003950003  
Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Landang Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**"Peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Peningkatan Investasi Asing di Sektor kawasan Industri Bantaeng (KIBA)**

Lokasi Penelitian : Kecamatan Pajukukang Kab. Bantaeng  
Lama Penelitian : 03 September 2018 s.d. 13 Oktober 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1201815009000022



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng

Pada tanggal : 03 September 2018

**BUPATI BANTAENG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,**



**MUHAMMAD TAFSIR P. S.S., M.AP**

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19690515 199803 1 012

Tembusan.

1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
3. Kantor Perusda Bantaeng



## RIWAYAT HIDUP

**Ilham**, lahir di Bantaeng pada tanggal 30 Maret 1995.

Anak ke dua dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ahmad dan Ibu Hanuri.

Penulis mulai menempuh pendidikan di SD Inpres 43 Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng pada tahun 2001 s.d tahun 2007, dan melanjutkan sekolah

di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'arif Lasepang Kabupaten Bantaeng pada tahun 2007 s.d tahun 2010, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Guppi Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, dan selesai pada tahun 2013. Penulis selanjutnya menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.



Kini dengan penuh perjuangan, tekad yang kuat serta proses belajar yang gigih, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) dengan gelar S. Sos pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Adapun organisasi yang pernah digeluti penulis ialah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Rayon Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar Cabang Gowa, anggota Institute Filsafat Indonesia (IFI), kemudian organisasi daerah Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB).